

Menghubungkan dan
Memajukan Bangsa
Melalui Akselerasi
Transformasi Digital

2022



2022

Menghubungkan dan Memajukan Bangsa Melalui Akselerasi Transformasi Digital



Laporan Tahunan
Kominfo 2022

Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9,
Jakarta Pusat, 10110

@kemenkominfo @kemkominfo kemkominfo

kominfo.go.id Kemkominfo Kemkominfo TV

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti



Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan



Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik



Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif



Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara



Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif



Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama





Versi Digital



komin.fo/LTKOMINFO2022

Baca Laporan Tahunan Kominfo Tahun 2022 selengkapnya pada versi digital dengan cara memindai QR Code di atas.

01**Infrastruktur Digital**

- Percepatan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi
- Digitalisasi Penyiaran
- Penataan Spektrum Frekuensi Radio



Foto: Donny Christian - Balmon SFR Kelas II Merauke - Bekerja dengan Senyum dan Tawa dari Tanah Papua

02**Pemerintahan Digital**

- Tata Kelola Pemerintahan Digital
- Kawal Pemanfaatan Ruang Digital

03**Ekonomi Digital**

- UMKM Digital
- Startup Digital



Kiprah Kominfo untuk

**Transformasi
Digital Nasional**



++

Dukungan Kominfo dalam Diseminasi Informasi

Peran Kominfo dalam Forum Internasional

04 Masyarakat Digital

- Pemerataan Literasi Digital
- Peningkatan Kompetensi Digital



Teknologi terbukti telah membawa masyarakat untuk dapat lebih cepat beradaptasi dengan tatanan baru kehidupan masyarakat setelah menghadapi pandemi dan kini menuju endemi.

Dengan dedikasi dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kementerian/lembaga, swasta, akademisi, media, masyarakat, hingga organisasi internasional, Kominfo terus bekerja dan berinovasi dalam mendorong percepatan transformasi digital nasional di berbagai lini.

Prakata

Digitalisasi membuka banyak peluang baru bagi kehidupan masyarakat, terutama di era pascapandemi. Dalam ikhtiar yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan nasional, Kementerian Kominfo berfokus untuk menghubungkan dan memajukan bangsa melalui akselerasi transformasi digital melalui berbagai kiprah.

Sebagai fondasi akselerasi inovasi dan pertumbuhan ekonomi, Kementerian Kominfo menjalankan dan memastikan pembangunan infrastruktur digital yang andal dan terjangkau bagi masyarakat. Tidak ada yang boleh tertinggal dalam proses transformasi digital ini. Seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok bangsa harus dapat mengakses layanan telekomunikasi dan internet.

Di era di mana dunia fisik dan digital telah terintegrasi, Kementerian Kominfo menjalankan peran dalam mewujudkan ruang digital yang kondusif dan produktif, melalui kiprah digitalisasi pemerintahan. Salah satu fokusnya, untuk dapat mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan lebih baik, Kementerian Kominfo tengah membangun Pusat Data Nasional.

Untuk merealisasikan potensi ekonomi Indonesia sepenuhnya, Kementerian Kominfo menjalankan program-program pengembangan ekosistem ekonomi digital yang mencakup UMKM dan startup digital. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas di sektor ekonomi digital, kami berusaha untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam kancah global.

Kemudian, yang paling utama dalam transformasi digital adalah aspek manusianya. Semua kemajuan teknologi ditujukan untuk dapat membawa dampak baik dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, Kementerian Kominfo menjalankan program pelatihan untuk memperkuat literasi digital dan meningkatkan keterampilan digital di segala lapisan masyarakat.

Selain fokus pada transformasi digital nasional, Kementerian Kominfo juga menjalankan fungsi *Government Public Relations* (GPR). Dalam peran ini, kami mengupayakan kecepatan dan keandalan dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat. Kami memahami bahwa komunikasi yang efektif dan transparan adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan publik.

Di tingkat global, Kementerian Kominfo aktif terlibat dalam berbagai forum internasional. Kami mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi dalam isu-isu global, membangun kemitraan yang kuat, dan berbagi pengalaman serta pengetahuan dengan negara-negara lain dalam hal transformasi digital.

Dalam Laporan Tahunan Kementerian Kominfo 2022, kami mengemas berbagai capaian tahun ini secara ringan dengan narasi dan visual yang mudah dicerna. Tujuan kami adalah memantik diskusi dan kolaborasi untuk mengakselerasi transformasi digital demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Kami mengundang semua pihak untuk berpartisipasi aktif, berbagi pengetahuan, dan berkolaborasi dalam menciptakan inisiatif inovatif untuk mengatasi tantangan yang ada. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan keterampilan digital, dan kesejahteraan bangsa melalui transformasi digital yang berkelanjutan.

Jakarta, Juni 2023

**Prof. Dr. Mohammad Mahfud Mahmodin,
S.H., S.U., M.I.P.**

Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika

Daftar Isi

Kiprah Kominfo untuk Transformasi Digital Nasional	1
Prakata	3
Momentum Akselerasi Kominfo 2022	7

01

Infrastruktur Digital 13

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi	17
<ul style="list-style-type: none">• Palapa Ring• BTS• Akses Internet• SATRIA	
Digitalisasi Penyiaran	31
<ul style="list-style-type: none">• Analog Switch Off (ASO)• Distribusi bantuan Set Top Box (STB)• Sosialisasi kepada Masyarakat Luas	
Penataan Spektrum Frekuensi Radio	39

04

Masyarakat Digital 67

Pemerataan Literasi Digital	69
Peningkatan Kompetensi Digital	73
<ul style="list-style-type: none">• Digital Talent Scholarship (DTS)• Pelatihan ASN• Digital Leadership Academy (DLA)	

02

Pemerintahan Digital 43

Tata Kelola Pemerintahan Digital 45

Kawal Pemanfaatan Ruang Digital 47

- Pengendalian Konten Negatif
- Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP)

03

Ekonomi Digital 57

UMKM Digital 59

Startup Digital 61

- Sekolah Beta
- Gerakan Nasional 1000 Startup Digital
- Startup Studio Indonesia
- HUB.id
- G20 Digital Innovation Network

Dukungan Kementerian Kominfo dalam Orkestrasi Komunikasi Publik 77

Peran Kementerian Kominfo Dalam Forum Internasional 83

Penghargaan 85

Kinerja Anggaran 87

Profil Kementerian Kominfo 89

Struktur Organisasi 90

Sumber Daya Manusia 92

Momentum Akselerasi Kominfo 2022

Januari

- Menkominfo setuju merger dan akuisisi PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia menjadi PT Indosat Ooredoo Hutchinson Tbk. Penggabungan ini diharapkan menghasilkan iklim industri telekomunikasi yang lebih produktif dan lebih efisien di Indonesia sehingga dapat memberikan dukungan untuk transformasi digital nasional.
- Lima grup Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) ditetapkan sebagai penyelenggara multiplexing (MUX). LPS tersebut adalah Media Group, Surya Citra Media (SCM), Trans Media Nusantara Citra (MNC), dan Rajawali Televisi (RTV).
- Pemerintah membagi pelaksanaan *Analog Switch Off* (ASO) di 112 wilayah layanan siaran di 341 daerah dan dibagi dalam tiga tahapan selama 2022, yakni pada 30 April, 25 Agustus, dan 2 November.
- Tahap pertama penyediaan 3.203.854 *Set Top Box* di 166 kabupaten telah selesai. Dengan perangkat ini, rumah tangga miskin yang hanya memiliki TV analog akan dapat menikmati siaran digital. Dukungan ini bertujuan menyelesaikan implementasi *Analog Switch Off*.
- Kampanye cegah stunting (anak kerdil) "4 Terlalu (4T)" dijalankan oleh Kementerian Kominfo dan BKKBN untuk mewujudkan target penurunan stunting menjadi 14 % pada tahun 2024. 4T tersebut adalah terlalu muda usia saat melahirkan, terlalu tua usia saat melahirkan, terlalu sering atau terlalu banyak anak dilahirkan, dan terlalu dekat jarak melahirkan.



Februari

- Dalam Peringatan Hari Pers Nasional, Menkominfo mengajak pers untuk beradaptasi dengan teknologi digital, seperti *big data* dan *artificial intelligence*, untuk dapat memperkaya kebutuhan data serta mendukung produksi dan distribusi konten.
- Kementerian Kominfo bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap *platform* keuangan digital untuk terus mengembangkan ekosistem dan investasi di sektor keuangan digital.

Maret

- Forum Digital Economy Working Group Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 resmi berlangsung dengan tema *Achieving a Resilient Recovery: Working Together For a More Inclusive, Empowering and Sustainable Digital Transformation*. DEWG terdiri atas serangkaian agenda *workshop, meeting, side event*, dan ditutup dengan pertemuan tingkat menteri.
- Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada 9 pejuang telekomunikasi yang menjadi korban KKB di Papua atas jasa dalam upaya pemerataan infrastruktur digital di Indonesia.
- Sidang ke-1 Digital Economy Working Group (DEWG) G20 membahas tentang arus data lintas batas negara. Para delegasi sepakat bahwa kerangka tata kelola data global meliputi perlindungan data pribadi, privasi data, dan penghapusan hambatan perdagangan menjadi dasar untuk mendukung operasi bisnis, perdagangan internasional, serta arus data lintas negara.



April

- Kementerian Kominfo menyediakan aplikasi Platform Mandiri Belajar (PMB) dan penyimpanan Pusat Data Nasional (PDN) untuk madrasah di bawah naungan Kementerian Agama.
- Kementerian Kominfo membuka uji publik atas Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penanganan Pertama Bukti Elektronik (RPM Bukti Elektronik).
- Digital Entrepreneurship Academy (DEA) diikuti oleh 15.134 wirausaha Indonesia untuk *go digital* dengan persentase peserta perempuan mencapai 63%.
- *Analog Switch Off* tahap I dilakukan pada 3 wilayah siaran yang terdiri atas 6 kabupaten dan 2 kota.

Mei

- Menkominfo meluncurkan Program Adopsi Teknologi Digital 4.0 bagi UMKM, program pendampingan berkelanjutan kepada UMKM produsen di sektor pengolahan di 13 kawasan prioritas.
- Sidang ke-2 Digital Economy Working Group (DEWG) G20 menghasilkan Dokumen Bali Package untuk isu konektivitas dan pemulihan pasca COVID-19.
- Peningkatan Kompetensi Digital
 - Kementerian Kominfo menggandeng *platform* pelatihan fintech 10x1000 Tech for Inclusion (10x1000) untuk melatih 60.000 talenta lokal menjadi wirausaha digital.
 - Kementerian Kominfo bermitra dengan Google memberikan sertifikasi global untuk 5.000 peserta Digital Talent Scholarship (DTS).
 - Traveloka berkomitmen mendukung Kementerian Kominfo dalam membangun talenta digital di Indonesia dengan mengambil bagian dalam program-program pelatihan *basic skill*.



Juni

- Kementerian Kominfo meraih Predikat Kepatuhan Tinggi dalam penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 dari Ombudsman Republik Indonesia.
- Menkominfo menjelaskan rencana refarming dan bauran pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan SFR untuk *fixed broadband* maupun *mobile broadband* dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI.

2022

Juli

- Sidang ke-3 Digital Economy Working Group (DEWG) G20 membahas berbagai inisiatif untuk mengoptimalkan pemanfaatan data.
- Di hari Anak Nasional, Kementerian Kominfo, Mastercard, dan YCAB Foundation meluncurkan *Data Science For Kids*, program untuk melatih talenta digital sejak dini, sebagai salah satu upaya menyiapkan 50 ribu *data scientist* di Indonesia.



Agustus

- Sidang ke-4 Digital Economy Working Group (DEWG) G20 merampungkan rumusan Bali Package dan difinalisasi dalam Digital Economy Ministers Meeting (DEMM) G20.

September

- Presidensi G20 Indonesia menyelenggarakan Digital Innovation Network (G20 DIN) yang melibatkan startup, *venture capital*, korporasi, dan pengambil kebijakan untuk berkolaborasi menciptakan inovasi teknologi digital dalam mengatasi masalah pascapandemi.
- HUT ke-21 Kementerian Kominfo pada 13 September 2022, momentum bagi seluruh sivitas untuk terus bergerak maju menyongsong masa depan Indonesia di era digital.
- Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di Indonesia pada 20 September 2022. Indonesia menjadi negara kelima di ASEAN yang memiliki payung hukum pelindungan data pribadi secara komprehensif.



Oktober

- Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan International Telecommunication Union (ITU) periode 2023–2026 untuk Region E pada pemilihan anggota dewan dalam rangkaian ITU Plenipotentiary Conference 2022. Indonesia memperjuangkan tiga agenda sejalan dengan prioritas pembangunan sektor komunikasi dan informatika, yaitu *Connecting the Unconnected*, *Women Empowerment*, dan *Capacity Building*.
- Kementerian Kominfo tingkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan siapkan jaringan backup layanan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada 15 November 2022.
- Kementerian Kominfo selenggarakan Kompetisi TIK Nasional untuk Disabilitas yang diikuti oleh 1.049 peserta. Tujuan dari kompetisi ini adalah mendorong inklusi digital bagi masyarakat penyandang disabilitas.

2022

November

- Implementasi *Analog Switch Off* berhasil dirampungkan sesuai jadwal (2 November 2022), Indonesia memasuki era *digital broadcasting*. Menkominfo berharap industri siaran semakin memberikan layanan terbaik bagi pemirsa dan rakyat.
- Menkominfo meluncurkan Chatbot Literasi Digital Siberkreasi, hasil kolaborasi Kementerian Kominfo, WhatsApp, dan ICT Watch. Chatbot yang dapat diakses melalui platform WhatsApp dengan nomor 0811-105-99977 ini bertujuan menjadi media pembelajaran literasi digital yang dapat dengan mudah diakses kapan saja dan dimana saja oleh masyarakat.
- Kementerian Kominfo memulai pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) dengan standar global Tier-4 pertama di Indonesia.
- Pasca gempa bumi Cianjur, Kementerian Kominfo dan operator telekomunikasi lakukan pemantauan dan pemulihan layanan telekomunikasi agar masyarakat dapat menggunakan kembali akses telekomunikasi dan internet dengan normal.



Desember

- Menkominfo meninjau pembangunan Laboratorium Pusat Pengujian Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi – Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (Lab. PPPTIK-BBPPT) di Depok. Lab ini akan menjadi fasilitas untuk pengujian perangkat TIK sesuai dengan standar internasional.
- Kementerian Kominfo meluncurkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). IMDI adalah alat pengukuran perkembangan masyarakat digital yang dirancang menggunakan *toolkit* yang direkomendasikan dalam G20 Summit.



01 Infrastruktur Digital

*Fondasi Akselerasi Inovasi dan
Pertumbuhan Ekonomi*

78,19%

**Penetrasi internet
di Indonesia**

*Sumber: Survei Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia (APJII) 2023*

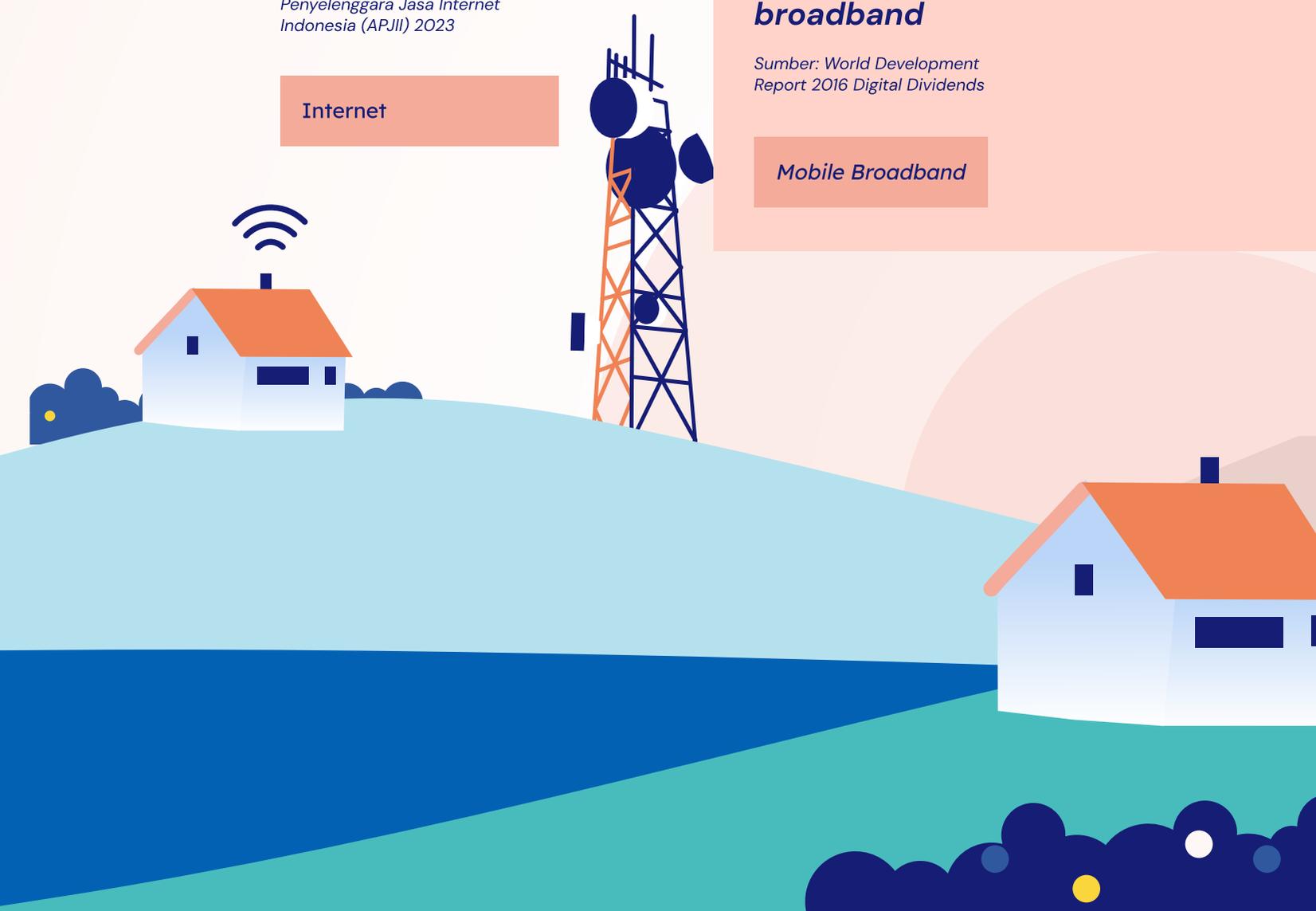
Internet

10%

**Peningkatan
penetrasi
layanan *mobile
broadband***

*Sumber: World Development
Report 2016 Digital Dividends*

Mobile Broadband





Internet kini telah menjadi salah satu kebutuhan utama. Internet terbukti membantu masyarakat untuk hidup dengan lebih berdaya, terlebih lagi selama menghadapi pandemi dan kini menuju endemi.

Dengan internet, kesempatan yang lebih luas akan terbuka bagi masyarakat. Bisa belajar, bekerja, dan berkarya dengan lebih efektif dan efisien.

Efek langsung dari tersedianya koneksi pada internet akan mendorong pertumbuhan inovasi, munculnya barang dan jasa baru, proses baru, model bisnis baru, serta meningkatnya daya saing dan fleksibilitas dalam ekonomi.



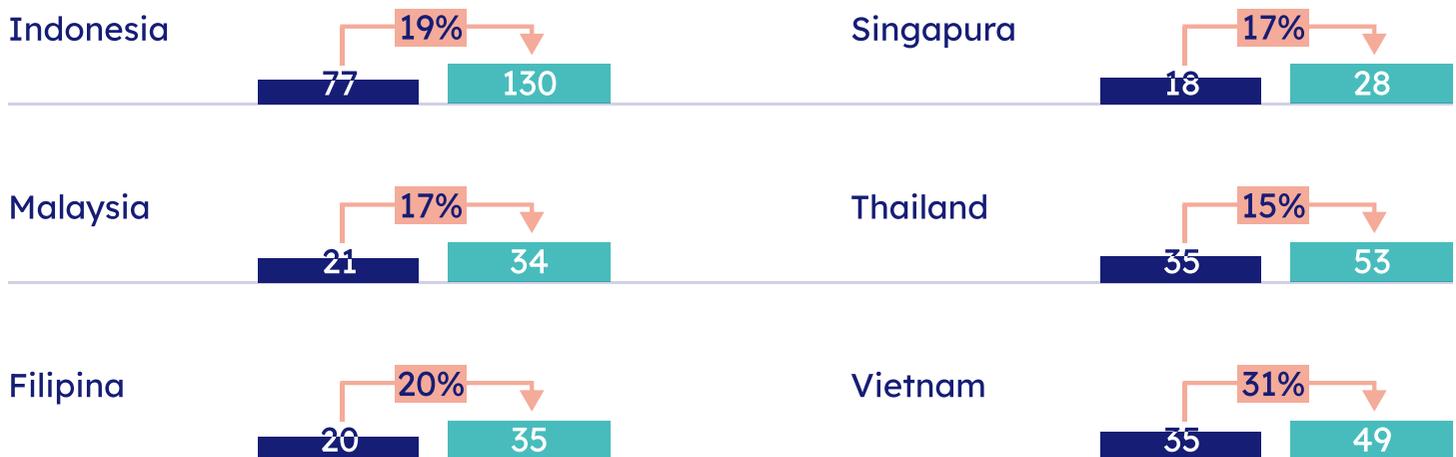
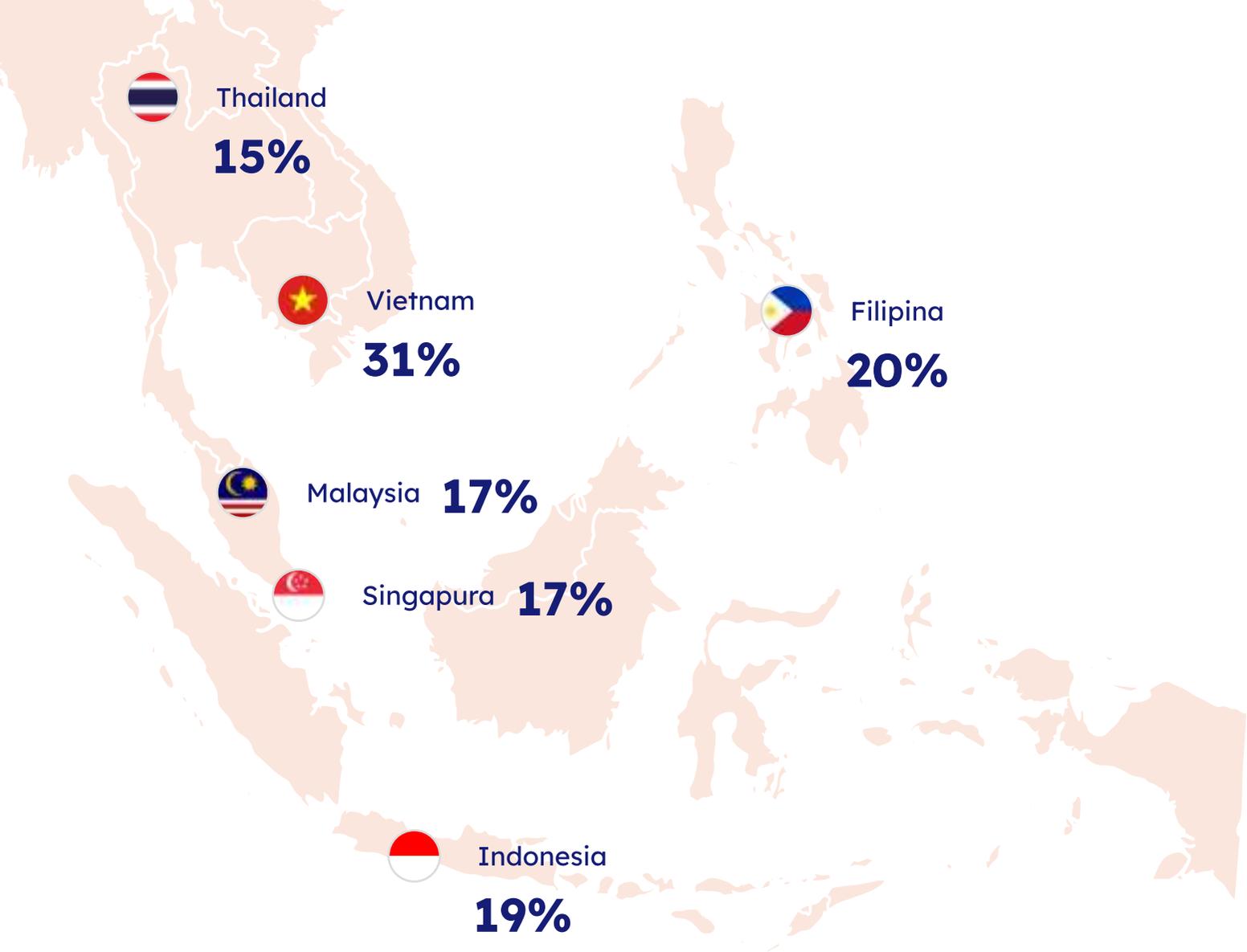
1,5%

Peningkatan
PDB negara

PDB Negara



Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Digital di Asia Tenggara



Sumber: Laporan e-Conomy SEA 2022, Google, Temasek and Bain & Company

Fakta Menarik Internet dari Seluruh Dunia

Kecepatan Internet Mobile

Negara	Mbps
 Uni Emirat Arab	139,41 Mbps (Tercepat)
 Indonesia	17,27 Mbps
 Ghana	7,90 Mbps (Terlambat)
Rata - Rata Dunia	33,97 Mbps

Durasi Penggunaan Internet harian

Negara	Durasi
 Afrika Selatan	9 Jam 38 Menit (Terpanjang)
 Indonesia	7 Jam 42 Menit
 Jepang	3 Jam 45 Menit (Terpendek)
Rata - Rata Dunia	6 Jam 37 Menit

Jumlah Download Mobile App

Negara	Peringkat
 China	1
 India	2
 Amerika Serikat	3
 Brazil	4
 Indonesia	5

Pengguna Mobile Video Call

Negara	Peringkat
 Afrika Selatan	1
 Filipina	2
 Nigeria	3
 Vietnam	4
 Kenya	5
 Uni Emirat Arab	6
 Indonesia	7

Mencari Tahu Tentang Brand di Media Sosial

Negara	Peringkat
 Kenya	1
 Brazil	2
 Indonesia	3
 Filipina	4
 Afrika Selatan	5

Kekhawatiran tentang Misinformasi Online

Negara	Persentase
 Nigeria	72,4% (Tertinggi)
 Indonesia	58%
 Austria	31,2% (Terendah)
Rata - Rata Dunia	53,9%

1.1 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi

Di kota-kota besar, mudah bagi masyarakatnya untuk mengakses berbagai opsi layanan telekomunikasi dan internet. Namun, ada daerah-daerah di Indonesia yang sampai hari ini belum mendapatkan layanan tersebut.

Mengapa?



Jumlah penduduk yang sedikit



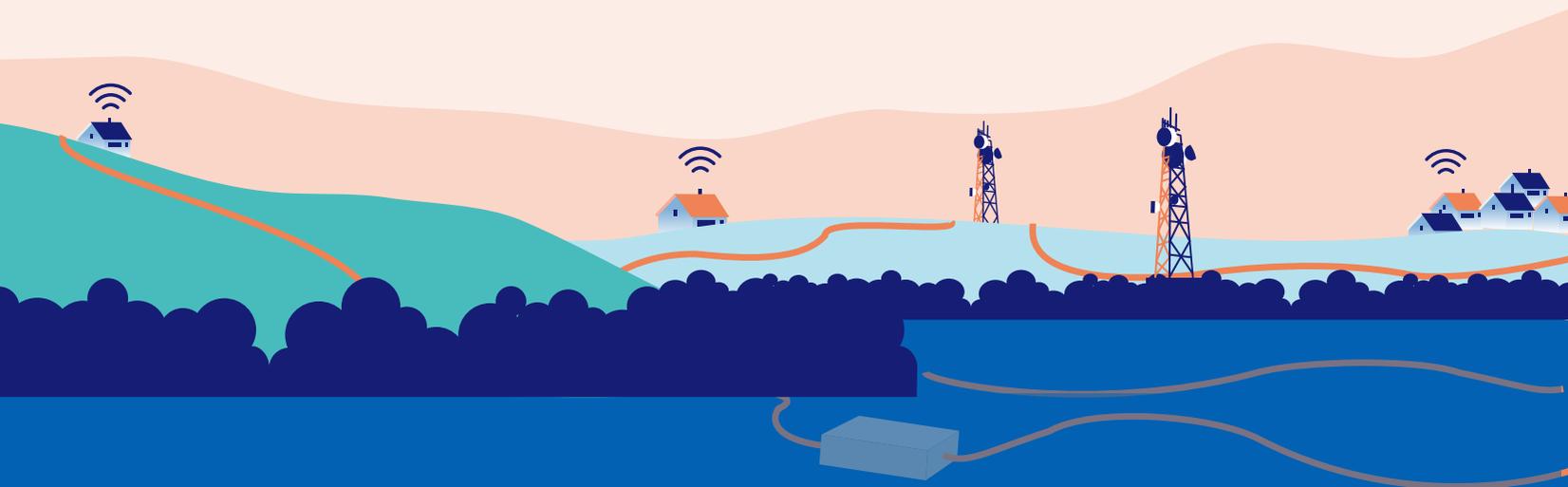
Pendapatan per kapita yang rendah



Daya beli

Beberapa faktor yang menghambat masuknya layanan telekomunikasi ke sebuah daerah.

Faktor-faktor tersebut membuat beberapa lokasi pemukiman tidak menarik untuk perusahaan swasta penyedia jasa telekomunikasi karena investasi yang mereka lakukan mungkin tidak akan membuahkan pendapatan bagi perusahaan.



Pada daerah-daerah tersebut, pemerintah harus menunjukkan afirmasi dan hadir dalam menghubungkan infrastruktur digital di Indonesia untuk dapat menghadirkan layanan telekomunikasi dengan:



Jangkauan merata



Harga terjangkau

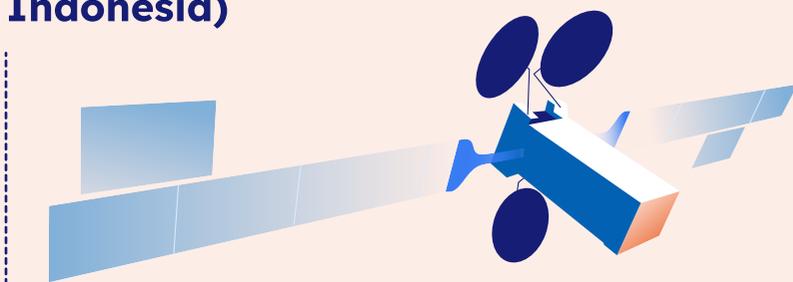


Kualitas mumpuni

Untuk menghadirkan infrastruktur telekomunikasi sebagai upaya akselerasi transformasi digital, Kominfo hadir membangun:

SATRIA

(Satelit Republik Indonesia)



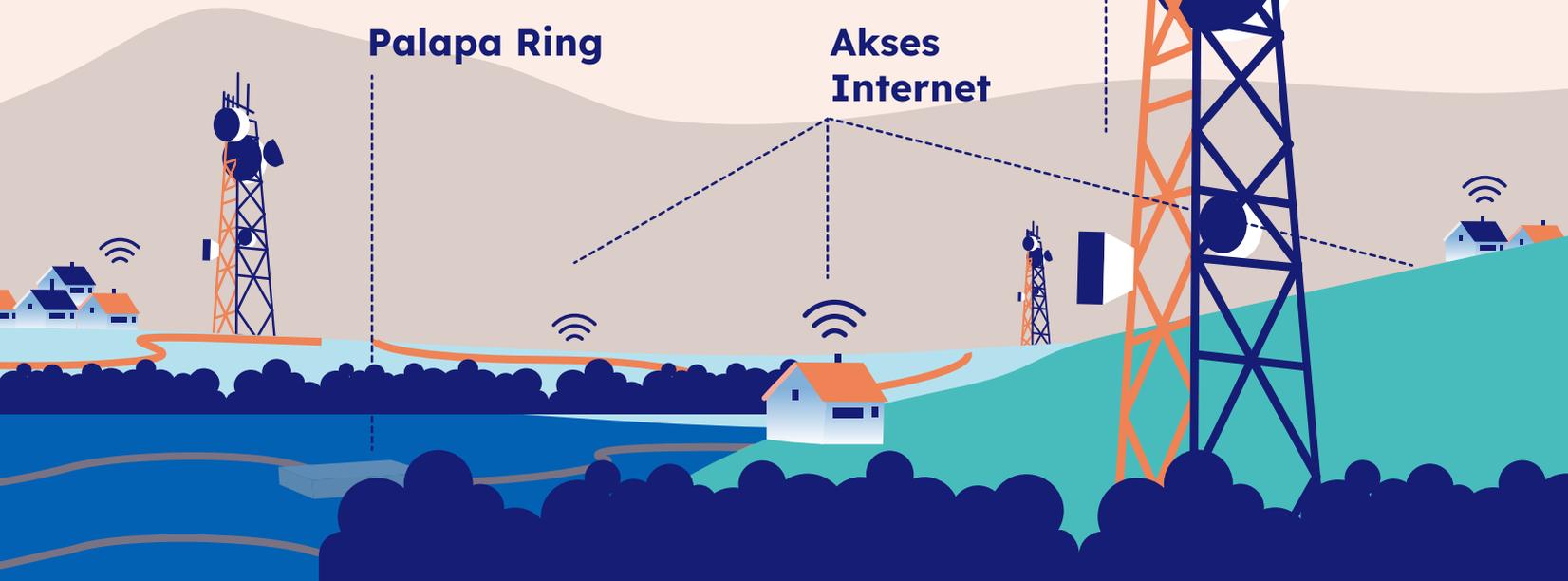
BTS

(Base Transceiver Station)



Palapa Ring

Akses Internet



Palapa Ring

Palapa Ring adalah jaringan serat optik nasional yang menghubungkan 57 kabupaten/ kota di Indonesia demi pemerataan akses pitalebar (*broadband*) di Indonesia.

57

Kabupaten/Kota

Terhubung dengan Palapa Ring



Nama Palapa Ring terinspirasi dari Sumpah Palapa oleh Gajah Mada, Mahapatih Kerajaan Majapahit untuk menyatukan Nusantara.



Palapa Ring bertujuan untuk pemerataan akses dan harga dari layanan internet cepat (*broadband*) di seluruh kota/ kabupaten di Indonesia.



Palapa Ring akan melayani daerah *non-financially feasible* (tidak layak secara bisnis/keuangan).



Adanya Palapa Ring diharapkan menjadi stimulus untuk penetrasi jaringan telekomunikasi dari para operator seluler.



Paket Barat

Utilisasi Palapa Ring (Kumulatif s.d. 2022)

Capaian

44,86%

Rata-rata Utilisasi Palapa Ring



Paket Barat

63,3%

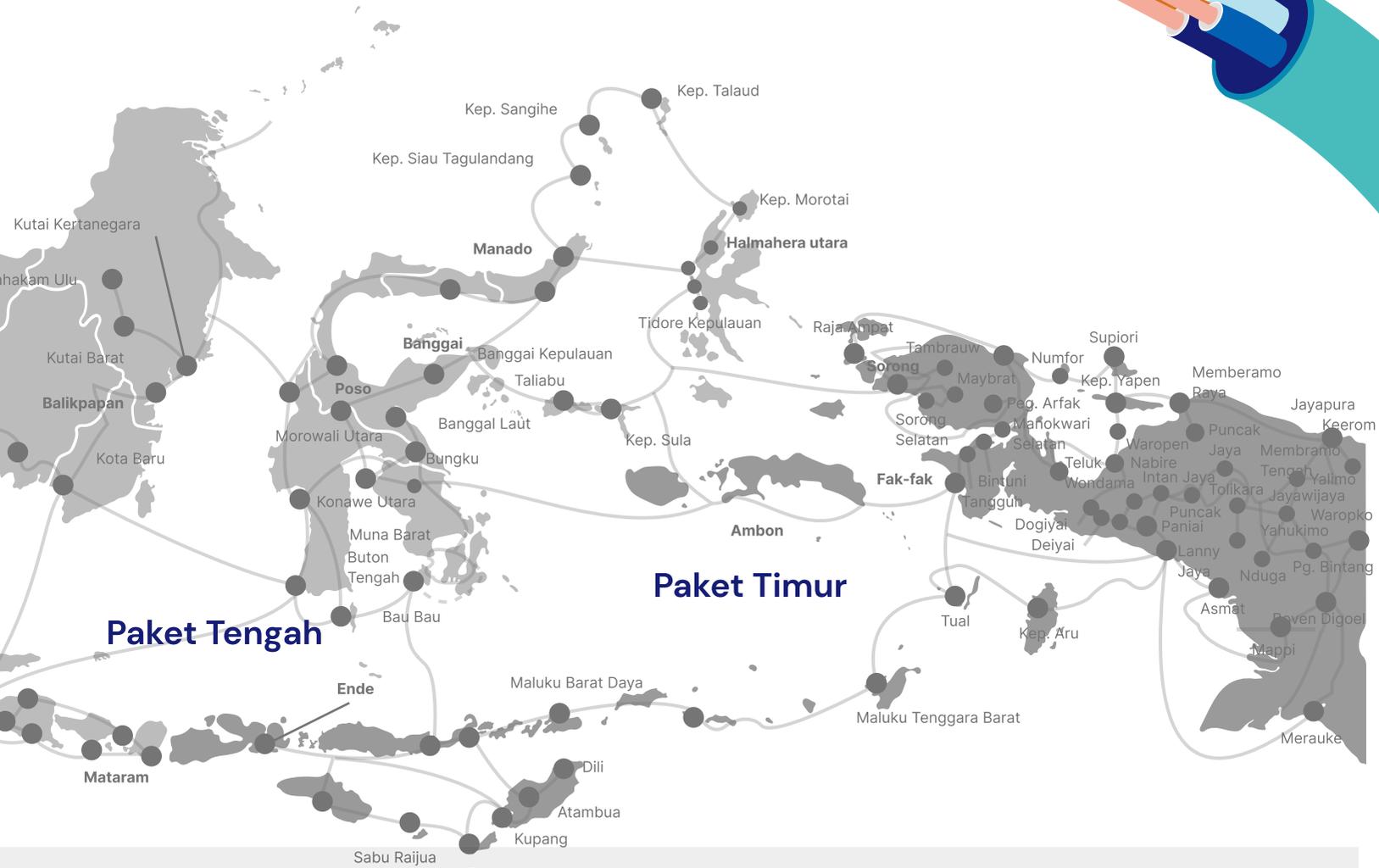
(190 Gbps dari total kapasitas 300 Gbps)

Target 2023

45%

Rata-rata Utilisasi Palapa Ring

Palapa Ring adalah proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha pertama di sektor telekomunikasi.



Paket Tengah

35,5%

(213 Gbps dari total kapasitas 600 Gbps)



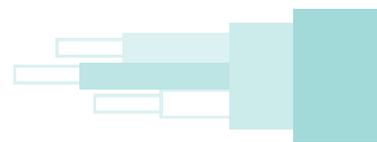
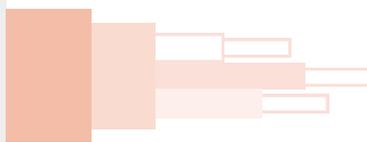
Paket Timur

35,5%

(284 Gbps dari total kapasitas 800 Gbps *Fiber Optic*)

+ 85,5%

(4.700 Mbps dari total kapasitas 5.500 *Microwave Link*)



BTS (Base Transceiver Station)

BTS berfungsi mengirim dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi, seperti telepon rumah, telepon seluler, dan gawai pintar.

Perusahaan operator seluler memakai BTS untuk memfasilitasi komunikasi nirkabel kepada konsumennya.



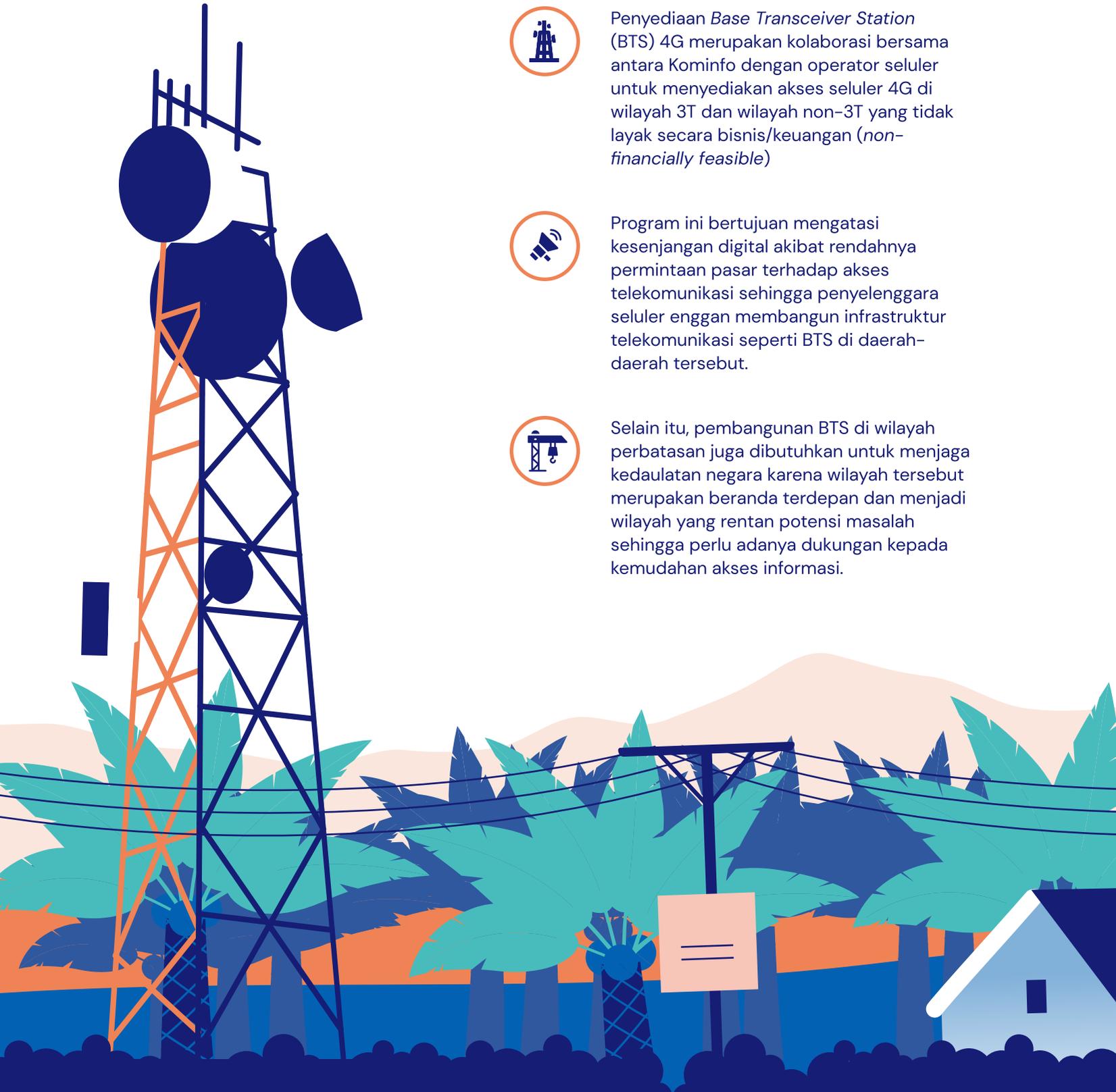
Penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G merupakan kolaborasi bersama antara Kominfo dengan operator seluler untuk menyediakan akses seluler 4G di wilayah 3T dan wilayah non-3T yang tidak layak secara bisnis/keuangan (*non-financially feasible*)



Program ini bertujuan mengatasi kesenjangan digital akibat rendahnya permintaan pasar terhadap akses telekomunikasi sehingga penyelenggara seluler enggan membangun infrastruktur telekomunikasi seperti BTS di daerah-daerah tersebut.



Selain itu, pembangunan BTS di wilayah perbatasan juga dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan negara karena wilayah tersebut merupakan beranda terdepan dan menjadi wilayah yang rentan potensi masalah sehingga perlu adanya dukungan kepada kemudahan akses informasi.



Capaian

**Pembangunan BTS
Hingga 2022:**

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Kominfo 2022

**5.410
Lokasi**

Daerah 3T

(+699 dari 2021)

**2.786
Lokasi**

Daerah Non-3T

(+2.445 dari 2021)

Dampak

Sumber: Laporan Analisis Dampak Kementerian Kominfo 2022

0,9%

**Pertumbuhan
ekonomi desa
di daerah 3T**

2,6%

**Pertumbuhan
ekonomi desa
di daerah non-3T**

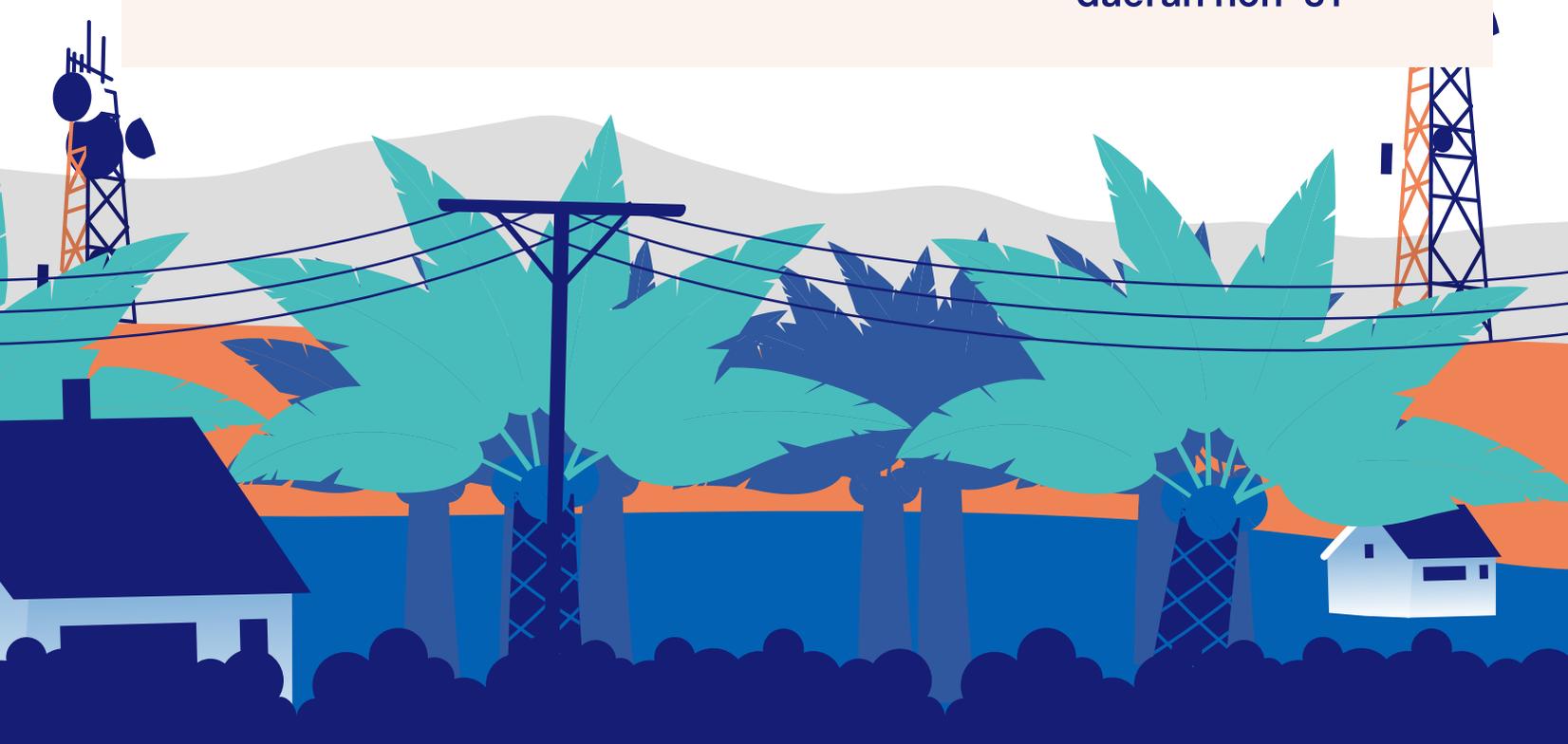
Target 2023

**332
Lokasi Baru**

**Penyediaan BTS
4G di wilayah 3T**

**649
Lokasi Baru**

**Pertumbuhan
ekonomi desa di
daerah non-3T**



Apa Saja Isu dalam Pembangunan BTS?

±15%

desa/kelurahan di Indonesia belum terjangkau 4G

1

Tantangan Geografis (Bentang Alam)

Mayoritas dari daerah 3T yang menjadi lokasi pembangunan BTS 4G adalah daerah yang sulit dijangkau serta belum memiliki infrastruktur dasar seperti jalan yang layak dan aliran listrik.

Ini mengakibatkan pengiriman material ke lokasi pembangunan menggunakan sarana transportasi dan logistik yang kurang memadai. Contohnya, pengangkutan dilakukan menggunakan gerobak, perahu-perahu tradisional, bahkan berjalan kaki.



Ada beberapa kendala utama yang dihadapi dalam pembangunan BTS di 12.548 dari total 83.218 desa/kelurahan yang terdiri atas:

9.113

Wilayah 3T

3.435

Wilayah Non-3T

2

Hambatan Transportasi, Terutama Udara

Ada banyak titik lokasi pembangunan BTS yang hanya dapat dijangkau oleh transportasi udara, terutama di wilayah pegunungan Papua.

Ketersediaan transportasi udara yang terbatas mengakibatkan pengangkutan material dan peralatan ke titik tujuan pembangunan menjadi lebih lama dari waktu yang direncanakan.



3

Gangguan Keamanan

60% pembangunan BTS di Indonesia berlokasi di Papua. Namun, kerap kali terjadi gangguan keamanan yang menghambat proses pembangunan di sana. Salah satu puncaknya adalah saat terjadi serangan penembakan di Kabupaten Puncak yang menewaskan 8 pekerja BTS telekomunikasi pada 2 Maret 2022.

Dari insiden tersebut, pekerjaan implementasi di sebagian besar Provinsi Papua dihentikan atas instruksi dari otoritas di Papua.

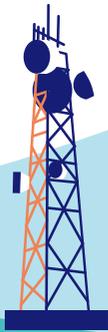


Akses Internet

Akses Internet merupakan program penyediaan sarana dan prasarana layanan internet di titik fasilitas publik yang terlaksana atas kolaborasi antara penyedia jasa telekomunikasi dan usulan dari K/L/D.

6.277 Lokasi

Pendidikan



4.699 Lokasi

Kantor Pemerintah



2.874 Lokasi

Pelayanan Kesehatan



467 Lokasi

Pusat Kegiatan Masyarakat



244 Lokasi

Pertahanan & Keamanan



100 Lokasi

Lokasi Wisata



45 Lokasi

Transportasi Publik

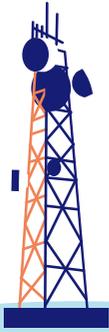


Capaian

15.396 Titik Lokasi Internet

telah disediakan di berbagai titik fasilitas publik.

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Kominfo 2022



593 Lokasi

Tempat Ibadah



97 Lokasi

Pelayanan Usaha



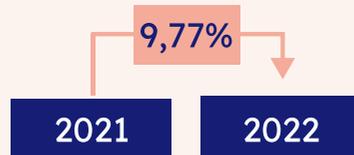
Dampak

Sektor Pendidikan

Peningkatan rata-rata nilai UN:

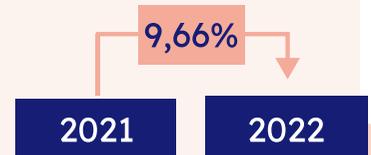
▲ **9,77%**

SMA IPA



▲ **9,66%**

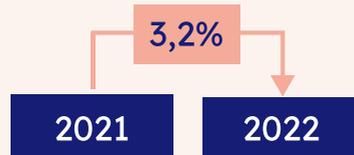
SMA IPS



Sektor Kesehatan

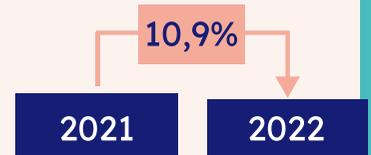
▼ **-3,2%**

Penurunan Kejadian Luar Biasa, terutama di Indonesia Timur



▼ **-10,9%**

Penurunan tingkat gizi buruk, terutama di Pulau Jawa-Bali



Sumber: Laporan Analisis Dampak Kementerian Kominfo 2022

Target 2023

9.755

Titik Lokasi Internet Baru

di berbagai titik fasilitas publik.

SATRIA (Satelit Republik Indonesia)

SATRIA menjadi solusi tepat guna dalam menjangkau daerah terpencil yang tidak terjangkau sehingga membantu mengentaskan kesenjangan akses *broadband internet*.

SATRIA-1 merupakan satelit multifungsi terbesar di Asia dengan kapasitas 150 Gbps.

Satelit ini sangat canggih dibandingkan dengan 9 satelit dengan total kapasitas transmisi 50 Gbps yang didayagunakan Indonesia saat ini. Indonesia merupakan negara ke-4 yang memiliki satelit dengan teknologi *very high throughput* setelah Luksemburg, Kanada, dan Amerika Serikat.



50 Gbps

Kapasitas

9 Satelit Eksisting

VS

150 Gbps

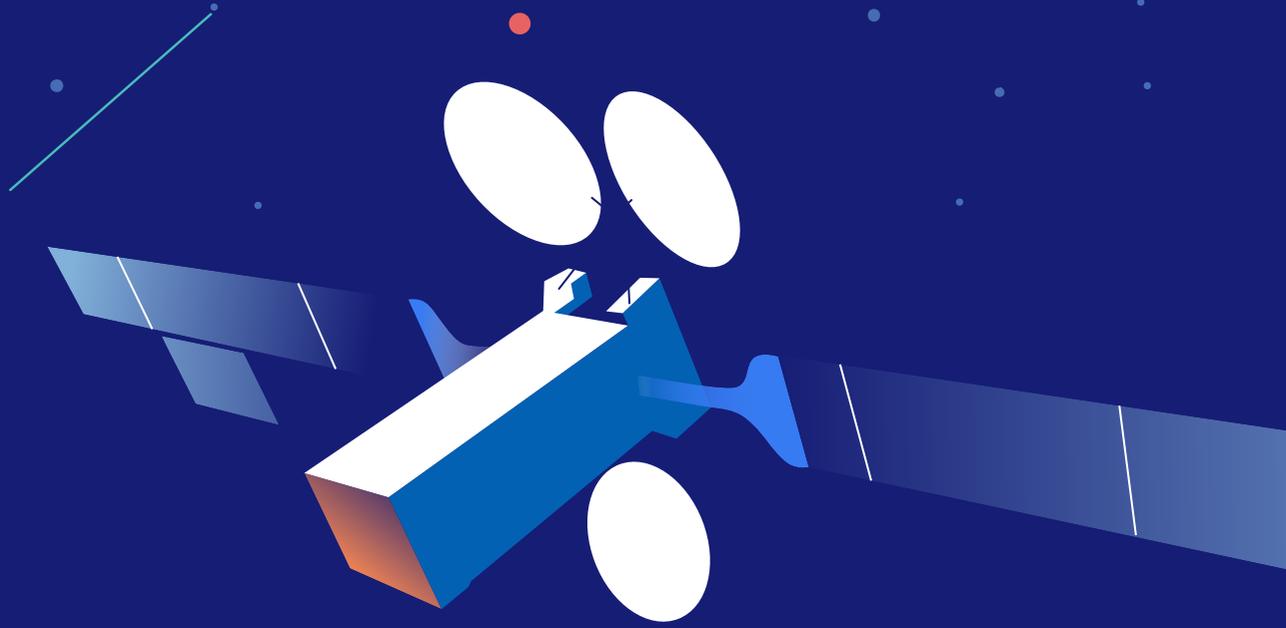
Kapasitas

SATRIA-1

Negara ke

#4

yang memiliki teknologi satelit
very high throughput



SATRIA-1 dibangun atas kerja sama Kominfo dengan:



Thales Alenia Space, Perancis
untuk perakitan satelit



SpaceX, Amerika Serikat untuk
produksi roket peluncur satelit

Capaian

Pada tahun 2022, proses pembangunan Satelit Multifungsi SATRIA-1 sudah mencapai:



Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Kominfo 2022

Linimasa Proyek Satelit Multifungsi SATRIA-1



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama



Pembentukan Tim Pemantauan Bersama antara Kominfo, Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan Badan Usaha Pelaksana (BUP)



Penandatanganan *Preliminary Working Agreement* antara BUP dan Thales Alenia Space



Penandatanganan Perjanjian Konsultan Pengawas Independen Proyek

3 Mei 2019

27 Mei 2019

3 September 2020

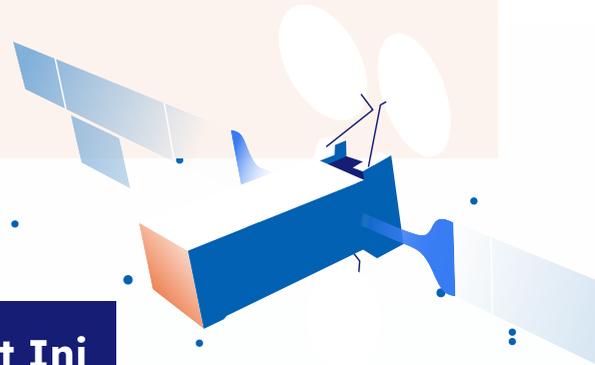
19 Oktober 2020

Target 2023

Peluncuran SATRIA-1 berkapasitas 150 Gbps dengan target 150.000 titik layanan publik.

150.000

Titik Layanan publik



Posisi Saat Ini



Konstruksi dan Peluncuran



Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan



Financial Close

11 Stasiun Bumi

sudah selesai dibangun di wilayah Cikarang, Batam, Banjarmasin, Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika, dan Jayapura. Progres pembuatan satelit sudah hampir tahap akhir



Operasi

Q2 2019—
Q1 2021

Q1-2022

Q4 2020—
Q4 2023

Q4 2023—
Selesai

1.2 Digitalisasi Penyiaran

Digitalisasi penyiaran adalah proses pengalihan teknologi siaran analog menjadi teknologi siaran digital.

Siaran Analog vs Siaran Digital

Siaran analog menggunakan kapasitas pita frekuensi yang lebih besar dibandingkan dengan siaran digital.

- Pada siaran analog, sinyal suara atau gambar disebarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang kontinu dan dapat memanfaatkan seluruh rentang frekuensi yang tersedia.
- Pada siaran digital, sinyal suara atau gambar diubah menjadi kode digital yang terdiri dari serangkaian angka biner, yang kemudian dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik.
- Dalam pengiriman data digital, hanya sejumlah tertentu frekuensi yang digunakan untuk membawa informasi, sehingga kapasitas pita frekuensi yang digunakan lebih kecil dibandingkan dengan siaran analog.

Dengan teknologi siaran digital, antar lembaga penyiaran bisa berbagi infrastruktur (*infrastructure sharing*) dengan teknologi *multiplexing* (MUX).

- Pada era analog, 1 perangkat infrastruktur TV hanya dapat digunakan oleh 1 stasiun TV saja. Pada era digital, dengan tambahan perangkat multiplexing (MUX), 1 perangkat infrastruktur TV bisa digunakan sampai dengan 13 stasiun TV. Spektrum yang ada bisa lebih berdaya guna dan lebih efisien digunakan.
- Satu siaran TV analog memerlukan pita frekuensi sebesar 8 MHz. Dengan teknologi digital, pita frekuensi tersebut bisa untuk memancarkan 5 siaran televisi.



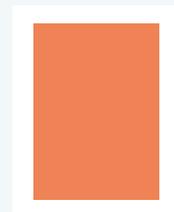
Kementerian Kominfo melakukan digitalisasi penyiaran untuk mendapatkan *digital dividend*.

Digital dividend tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai hal, termasuk peningkatan layanan *broadband*.

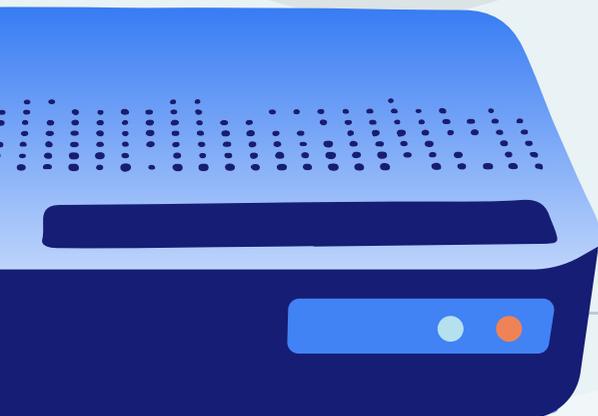
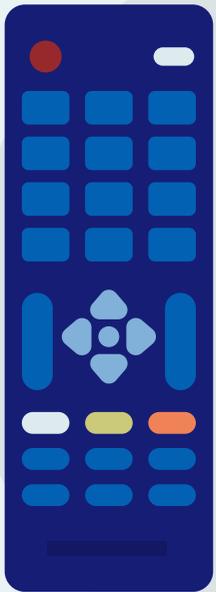
Apa itu Digital Dividend?

Digital dividend adalah sebutan bagi spektrum frekuensi radio yang menjadi tersedia ketika proses transisi dari penyiaran analog ke digital selesai.

Ketika penyiaran televisi beralih ke teknologi digital, mereka menggunakan spektrum frekuensi radio secara lebih efisien, sehingga mengurangi jumlah spektrum yang diperlukan untuk penyiaran.



Bagaimana *Digital Dividend* Digunakan untuk Peningkatan Layanan *Broadband*?



Spektrum yang lebih efisien

Digital dividend memungkinkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang lebih efisien sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan *broadband*.



Peningkatan layanan dan aplikasi

Dengan peningkatan kapasitas dan kecepatan yang disediakan oleh *digital dividend*, penyedia layanan *broadband* dapat menghadirkan layanan dan aplikasi baru, seperti streaming video berkualitas tinggi, telemedisin, dan *e-learning*.



Pengembangan infrastruktur jaringan

Digital dividend memberikan spektrum tambahan yang diperlukan untuk pengembangan infrastruktur jaringan nirkabel *broadband*, seperti 4G dan 5G, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kecepatan dan kapasitas internet.



Pertumbuhan ekonomi

Investasi dalam infrastruktur *broadband* dan pengembangan teknologi baru berkat *digital dividend* akan berdampak positif pada perekonomian. Ini akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendukung inovasi di berbagai sektor industri.



Jangkauan yang lebih luas

Frekuensi yang diperoleh melalui *digital dividend*, terutama dalam rentang UHF (*Ultra High Frequency*), memiliki sifat propagasi yang baik, memungkinkan mereka mencakup jarak yang lebih jauh. Ini memungkinkan layanan *broadband* mencapai daerah pedesaan dan terpencil yang sebelumnya kurang terjangkau.



Inklusi digital

Peningkatan layanan *broadband* yang didorong oleh *digital dividend* akan membantu mengurangi kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, memastikan akses yang lebih merata ke teknologi informasi dan komunikasi, pendidikan, dan peluang ekonomi.

ASO (Analog Switch Off)

Capaian

85%

Pada 2022, 85% lembaga penyiaran TV sudah melakukan migrasi siaran TV dari analog ke digital/
Analog Switch Off (ASO)

Lembaga Penyiaran TV Bermigrasi

(591 dari total 695 lembaga penyiaran)

76,44%

Jangkauan layanan penyiaran TV digital

40

Wilayah Layanan

Sumatra

5

Wilayah Layanan

Jawa

137

Wilayah layanan sudah ASO

76,44% = 199.624.863 penduduk

Konversi jangkauan layanan penyiaran TV digital berdasarkan jumlah penduduk

162

**Lembaga
Penyiaran TV**

Telah bersiaran
seluruhnya
secara digital

429

**Lembaga
Penyiaran TV**

Telah bersiaran
secara *simulcast*
(siaran analog dan
digital bersamaan)

104

**Lembaga
Penyiaran TV**

Berencana akan
bermigrasi ke siaran
digital tanpa melalui
simulcast



137 Wilayah | 265 Kab/Kota

Sebaran wilayah layanan siaran yang sudah ASO

Distribusi Bantuan STB (Set Top Box)

Capaian

Set Top Box adalah perangkat yang berfungsi mengubah sinyal digital yang diterima dari satelit ke dalam format analog agar dapat ditampilkan ke layar televisi analog.

Sosialisasi kepada Masyarakat Luas

Capaian

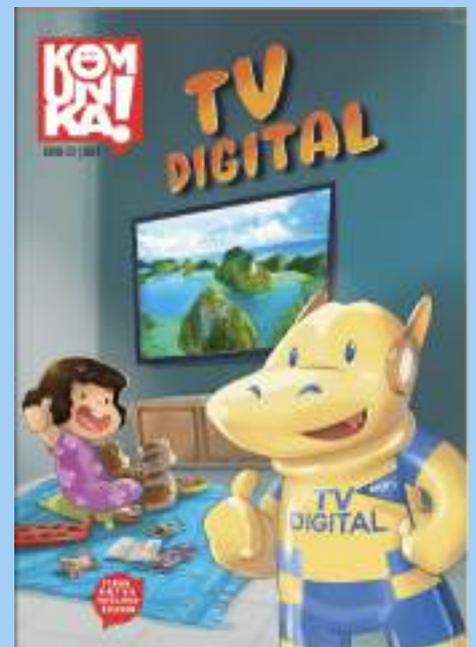
Berdasarkan survei nasional Kominfo:

Website Publikasi Informasi Siaran Digital Indonesia



siarandigital.kominfo.go.id

Komunika: TV Digital



1.448.995 unit

Set Top Box (STB)

Telah disalurkan kepada rumah tangga miskin

1.207.776 unit

Set Top Box (STB)

Disalurkan oleh pemerintah

241.219 unit

Set Top Box (STB)

Disalurkan oleh penyelenggara multipleksing (MUX)

84,9%

Masyarakat lebih puas dengan siaran digital



79,1%

Masyarakat akan beralih ke siaran digital



88,6%

Masyarakat bersedia membeli Set Top Box (STB) secara mandiri



komin.fo/komikaso

Buku Saku ASO: Migrasi Siaran TV Analog ke TV Digital



komin.fo/bukuaso

1.3 Penataan Spektrum Frekuensi Radio

Pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio menjadi penunjang kebutuhan koneksi internet yang terus tumbuh di Indonesia.

Untuk menyediakan kapasitas dan kualitas jaringan bagi layanan akses mobile *broadband* 4G dan 5G, Kementerian Kominfo menerapkan beberapa kebijakan untuk penambahan dan penataan spektrum frekuensi radio.

Hal ini juga berkaitan erat dengan program Kementerian Kominfo lainnya, yaitu menuntaskan proses *Analog Switch Off* (ASO) pada digitalisasi penyiaran.

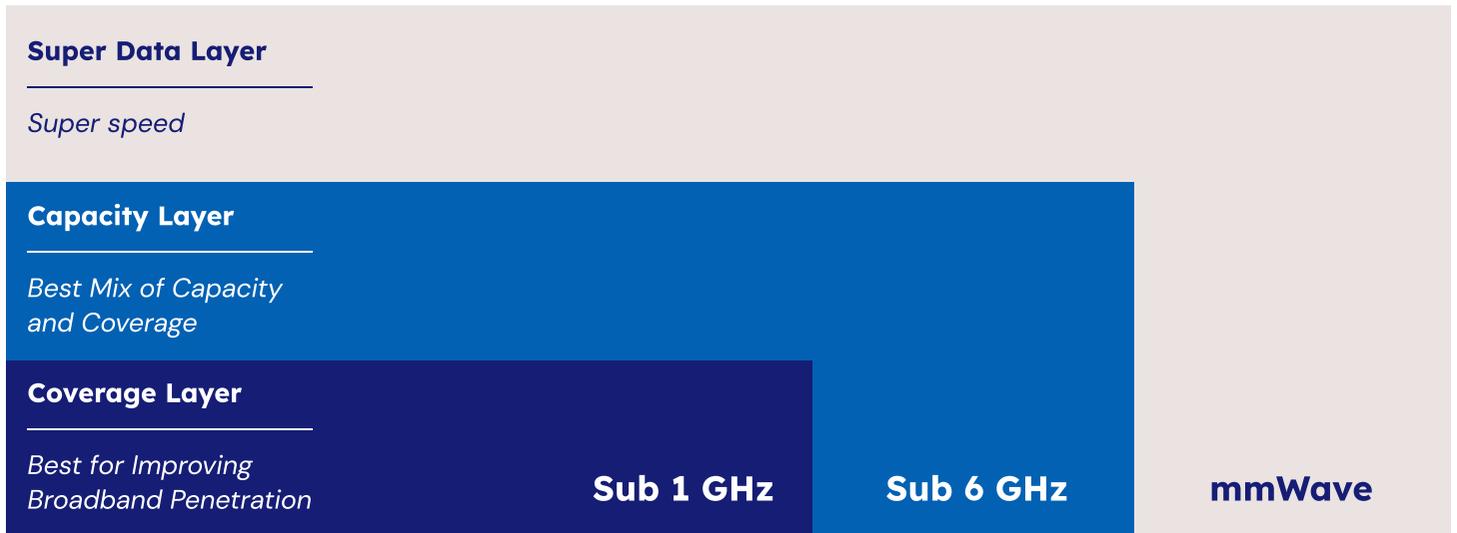
Apa Itu Spektrum Frekuensi Radio?

Spektrum radio adalah gelombang kasat mata yang memungkinkan adanya teknologi nirkabel. Spektrum radio adalah sumber daya yang terbatas.

Meningkatnya penggunaan teknologi ini telah menyebabkan kekurangan spektrum yang tersedia sehingga dapat menyebabkan kualitas layanan yang buruk.

Kebutuhan Penambahan Spektrum Frekuensi untuk *Mobile Broadband*





Lower Band

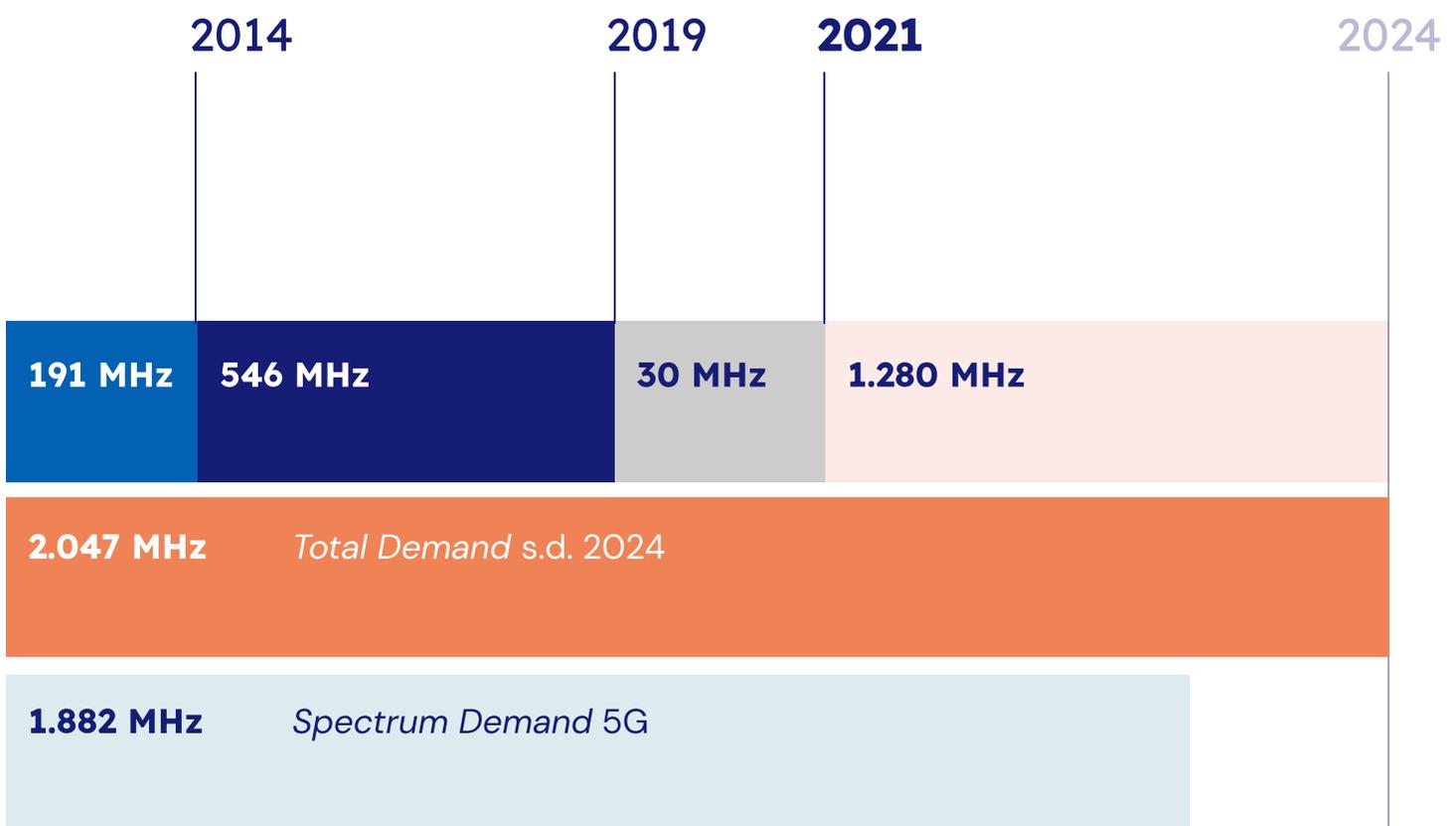
Terbaik untuk *building penetration* dan memperluas jangkauan *broadband* seluler terutama di daerah pedesaan.

Middle Band

Umbrella network, kombinasi *moderate* antara *mobility & capacity*.

Higher Band

Menyediakan jaringan 5G dan sangat sesuai untuk transmisi kapasitas besar & otomasi industri yang membutuhkan komunikasi super responsif dengan *latency* kurang dari 1 milisecond.



Kebijakan Penambahan dan Penataan Spektrum Frekuensi Radio



Teknologi Netral (2G/3G/4G/5G)

Untuk memberikan kebebasan bagi operator seluler menggunakan frekuensi untuk teknologi 2G, 3G, atau 4G sesuai dengan kebutuhan wilayah, termasuk jika nantinya akan dikembangkan menjadi teknologi 5G, Kementerian Kominfo menerapkan kebijakan teknologi netral.



Frekuensi Izin Kelas (WIFI & IoT)

Untuk meningkatkan kapasitas dengan teknologi *Licensed Assisted Access*, Kementerian Kominfo telah memberikan tambahan alokasi frekuensi izin kelas yang bisa dimanfaatkan operator.

Agar memberi ruang inovasi tanpa harus mengurus Izin Stasiun Radio (ISR), Kementerian Kominfo juga menetapkan tambahan alokasi frekuensi izin kelas untuk WiFi dan IoT.



Refarming Frekuensi

Untuk meningkatkan kualitas layanan 4G LTE di Indonesia, Kementerian Kominfo telah melakukan dua kali refarming frekuensi.



Capaian

Sepanjang tahun 2022, telah dilakukan beberapa upaya untuk mempersiapkan rancangan kebijakan dalam rangka mendukung penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan *mobile broadband*.

RPM

(Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika)

Rancangan kebijakan disiapkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM) tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz.

Substansi yang diatur dalam RPM diusulkan mencakup 4 hal berikut:

1. Rentang pita frekuensi radio 700 MHz mengikuti standar 3GPP Band 28 (4G) / 3GPP Band n28 (5G) moda FDD pada rentang 703 – 748 MHz *uplink* berpasangan dengan 758 – 803 MHz *downlink*.
2. Pita frekuensi radio 700 MHz ditetapkan untuk keperluan penyelenggaraan jaringan *bergerak seluler* dengan wilayah layanan nasional yang dalam pemanfaatannya melekat kebijakan netral teknologi berbasis standar International Mobile Telecommunication (IMT). Dalam RPM ini diasumsikan kondisi pita Digital Dividend 700 telah kosong dari pendudukan TV analog.
3. Penetapan hak penggunaan spektrum frekuensi radio 700 MHz diberikan melalui seleksi dengan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) nasional. Berdasarkan tanggapan pernyataan minat yang diterima dari operator seluler, disimpulkan bahwa kondisi terhadap pita *Digital Dividend* 700 MHz ini adalah jumlah ketersediaan pita frekuensi radio kurang dari jumlah permintaan.
4. Pemenang seleksi pita *Digital Dividend* 700 MHz dapat diberikan kewajiban tambahan (seperti contoh: kewajiban pembangunan/*roll out obligation*). Dengan memperhatikan masih banyaknya area yang belum terlayani sinyal 4G secara memadai, maka pita *Digital Dividend* 700 MHz dapat dipaketkan hak penggunaannya dengan kewajiban pembangunan guna akselerasi pemerataan sinyal 4G. Kewajiban pembangunan tersebut menjadi kewajiban tambahan bagi pemenang seleksi selain pembayaran PNB BHP spektrum frekuensi radio. Kewajiban pembangunan tersebut rencananya akan ditetapkan di dalam Dokumen Seleksi merujuk pada kebijakan yang terlebih dahulu ditetapkan oleh Menteri (umumnya dalam bentuk Keputusan Menteri).

Target 2023

Penambahan kapasitas spektrum frekuensi radio untuk *mobile broadband* sebesar 290 MHz.

▲ 290 MHz

Mobile Broadband

02 Pemerintahan Digital

Wujudkan Ruang Digital yang Kondusif dan Produktif





Dalam era digital, pemerintah harus proaktif dalam mengadaptasi teknologi terbaru agar dapat mengefisiensikan proses birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan sehingga menciptakan lingkungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah juga berperan menjaga ruang digital yang kondusif, produktif, serta inklusif. Harus tercipta kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan.

Untuk itu, pemerintah memperkuat infrastruktur digital, mengembangkan kebijakan yang mendukung, serta melibatkan masyarakat dalam proses transformasi digital, guna menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berdaya saing.



#77

(E-Government
Development Index)

Indonesia menduduki urutan
77 dari 193 negara

Ranking Perkembangan
E-Government

Sumber: United Nations
E-Government
Development Survey 2022

2.1 Tata Kelola Pemerintahan Digital

+2700

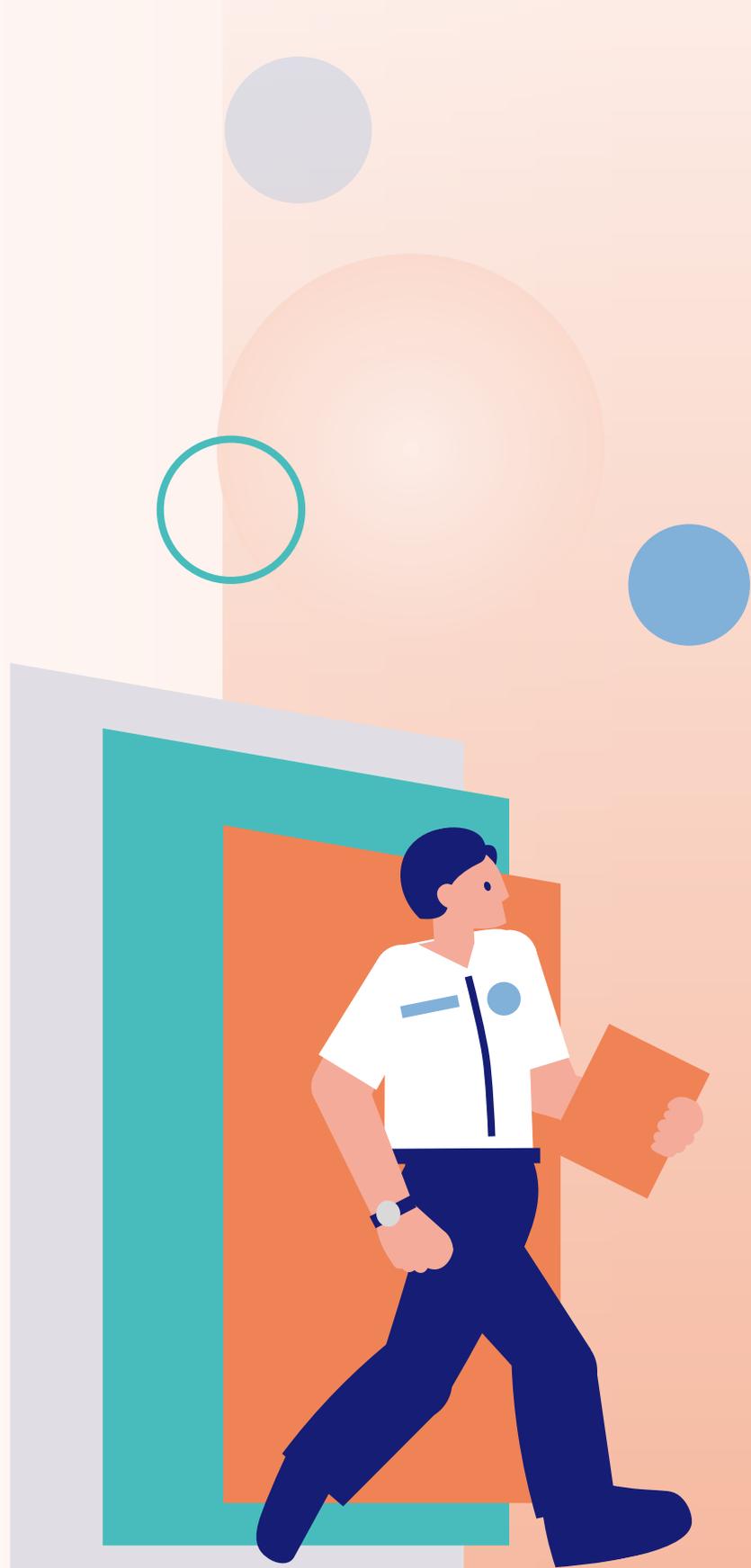
Pusat Data
Pemerintah

3%

Menggunakan
Cloud

Untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kominfo membangun Pusat Data Nasional. Saat ini, pemerintah pusat dan daerah menggunakan +2.700 pusat data dan hanya 3% yang menggunakan *cloud*.

Dengan Pusat Data Nasional, diharapkan tata kelola satu data Indonesia dan pengambilan kebijakan berbasis data dapat dilakukan secara cepat dan lebih akurat.



Capaian

Pembangunan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)

Kapasitas 10.000 TB telah dimanfaatkan sebesar 9.113 TB oleh 296 K/L/D pada 2022

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Kominfo 2022

Pembangunan Pusat Data Nasional

80%

Cikarang

Groundbreaking (2022)

Luas: 49.491 m²

25%

Batam

Serah terima sertifikat lahan (2022)

Luas: 50.066 m²

Target 2023

Pembangunan Pusat Data Nasional

Cikarang

Pembangunan (2023)

Batam

Pembangunan (2023)

Dampak

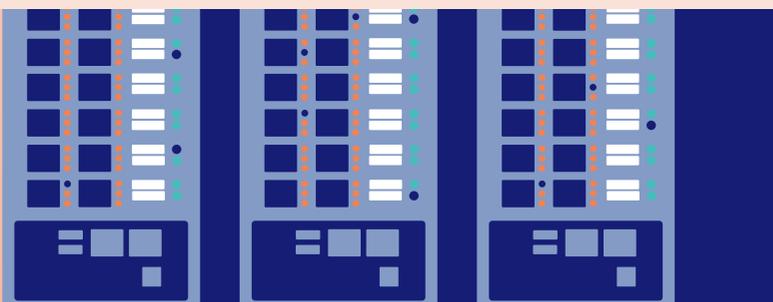
PDN mendorong terlaksananya elektronifikasi transaksi pada instansi pemerintah

Dampak bagi pelayanan publik

Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kemudahan, kecepatan, keamanan, dan kehandalan layanan pemerintah melalui integrasi dengan kanal-kanal layanan eksisting baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta.

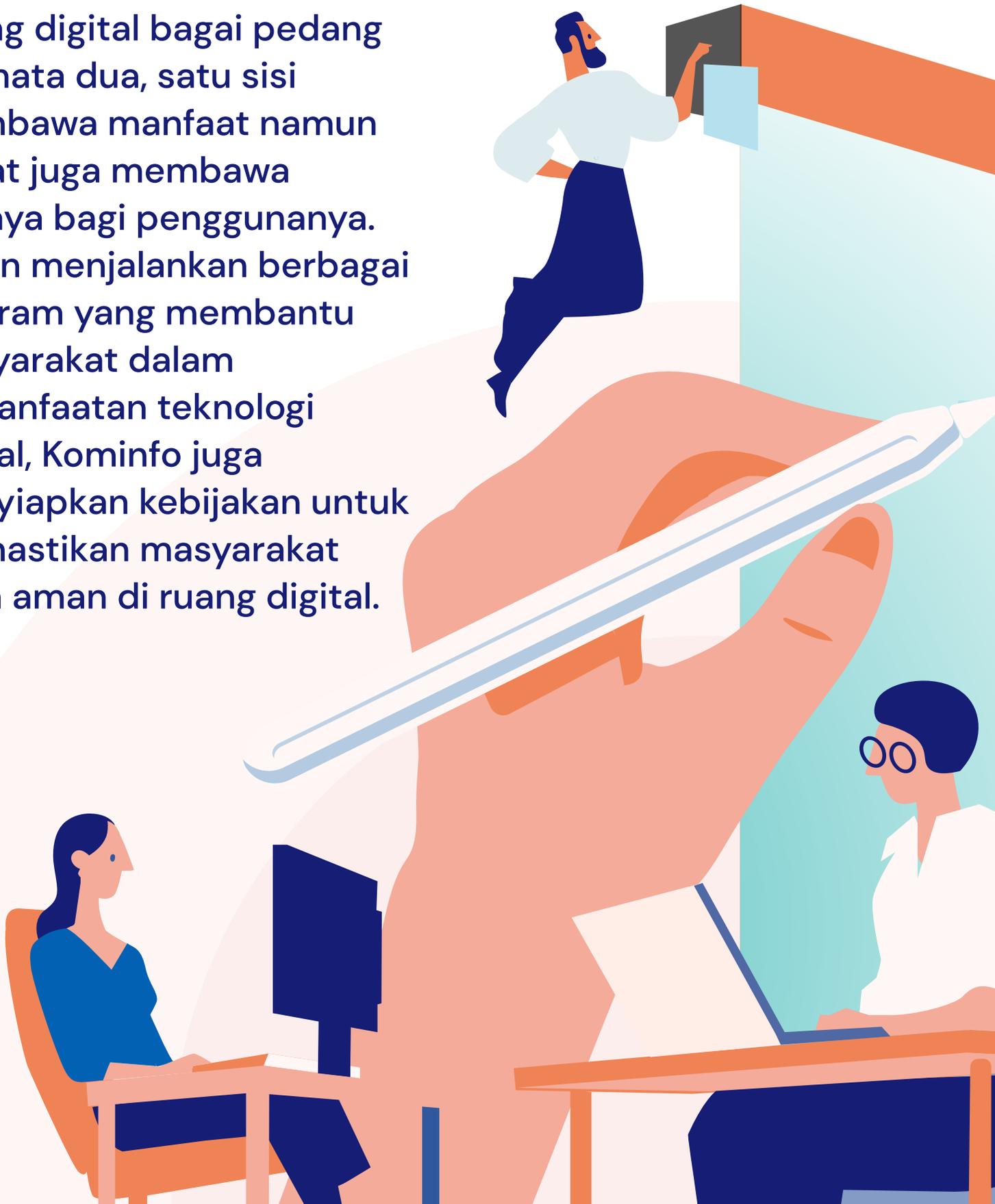
Dampak bagi layanan pemerintah

Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan birokrasi pemerintah, mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik dan meningkatkan potensi pendapatan pemerintah melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi.



2.2 Kawal Pemanfaatan Ruang Digital

Ruang digital sebagai pedang bermata dua, satu sisi membawa manfaat namun dapat juga membawa bahaya bagi penggunanya. Selain menjalankan berbagai program yang membantu masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital, Kominfo juga menyiapkan kebijakan untuk memastikan masyarakat lebih aman di ruang digital.



Tiga Strategi Kementerian Kominfo untuk Ruang Digital yang Positif dan Kondusif



Level hulu

Menyelenggarakan pelatihan digital untuk mempersiapkan SDM yang melek digital



Level tengah

Membangun peralatan dan mengembangkan sistem teknologi untuk pengendalian

Pengendalian Konten Negatif (hal 49)



Level hilir

Menyiapkan SOP dan peraturan yang lebih matang untuk antisipasi pelanggaran hukum di ruang digital

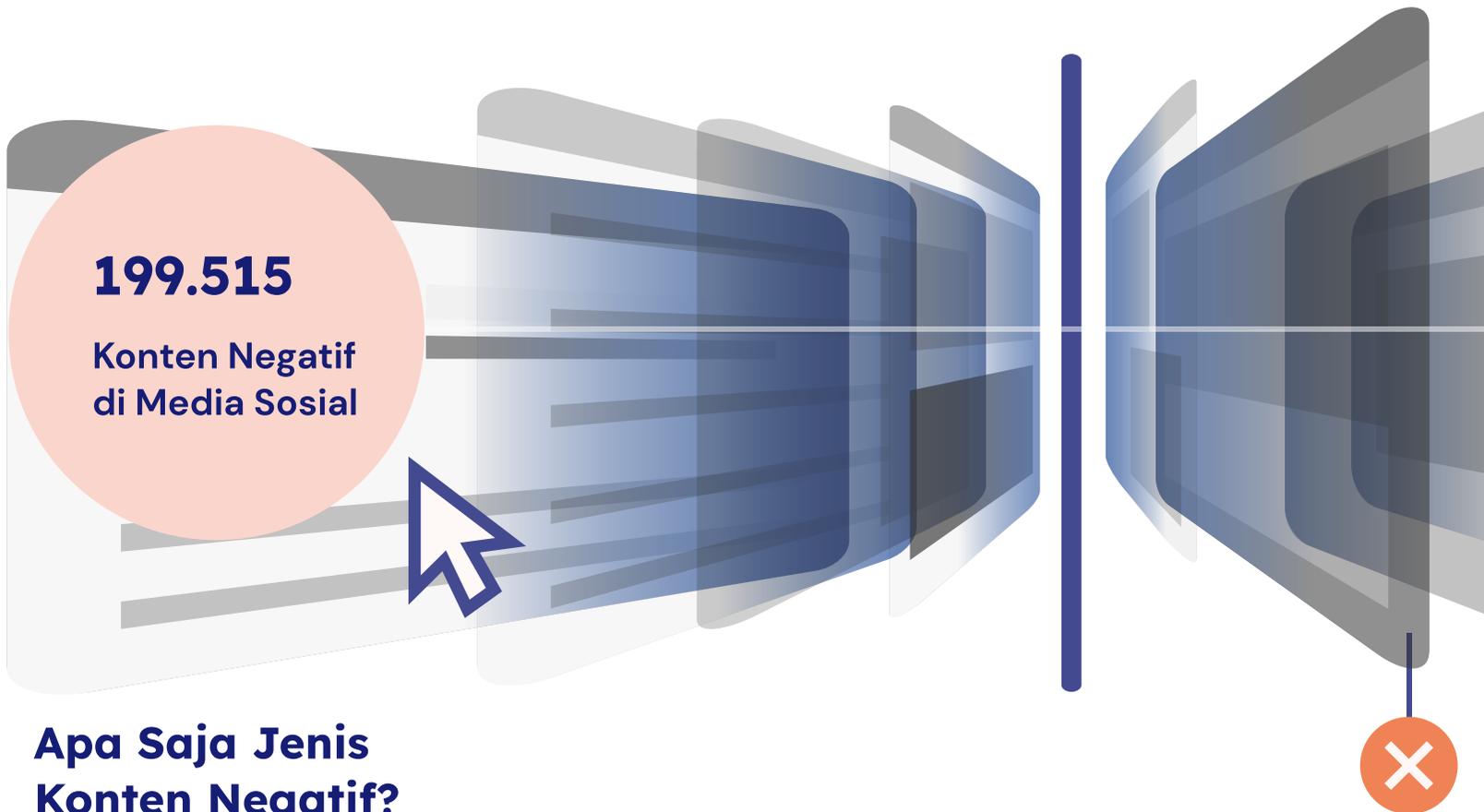
Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) (hal 51)

Pengendalian Konten Negatif

437.741

Konten Negatif

Selama 2022, sebanyak 437.741 konten negatif yang diadukan berhasil ditangani.



Apa Saja Jenis Konten Negatif?



Seperti Apa Sistem Pemblokiran Konten Negatif?

238.226

Konten Negatif
di Situs Web

Kementerian Kominfo memiliki tim Aduan Konten yang beroperasi 24/7 menggunakan mesin pengais konten negatif atau disebut mesin AIS. Mesin AIS menggunakan metode *keyword based search* dengan memanfaatkan *artificial intelligence* untuk mencari konten negatif.



Laporan Masyarakat

Tim Aduan Konten mendapat laporan dari masyarakat terkait konten negatif.



Verifikasi

Konten negatif yang ditemukan oleh mesin AIS kemudian digunakan sebagai salah satu input bagi tim verifikator yang memproses konten negatif.



Bukti Digital

Bukti nyata konten negatif akan di-*screen capture* sebagai bukti digital, dan diteruskan ke eksekutor untuk tindakan terakhir.



Pemblokiran

Jika sebuah situs atau akun memang terverifikasi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, eksekutor dari tim AIS akan memblokirnya dengan berkoordinasi ke penyedia jasa internet dan penyelenggara media sosial.

Berita
Bohong/
Hoaks

14



Bagaimana Cara Melaporkan Konten Negatif?

Setiap orang berhak menyampaikan pengaduan konten negatif dengan cara mendaftarkan diri, mengunggah tautan serta *screenshot* situs atau konten yang dilaporkan disertai alasan, dan memantau proses penanganan yang dilakukan oleh Tim Aduan Konten.

Aduan terkait konten bermuatan negatif dapat diakses melalui:

🌐 aduankonten.id

✉️ aduankonten@kominfo.go.id

📷 [@aduankonten](https://www.instagram.com/aduankonten)

☎️ +62 811 9224 545

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP)

Indonesia akhirnya resmi memiliki UU Pelindungan Data Pribadi pada 17 Oktober 2022. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara ke-127 yang memiliki UU PDP. Undang-undang ini hadir untuk melindungi data pribadi warga negara Indonesia.

Negara ke

#127

yang memiliki
UU PDP

Mengapa Harus Ada UU PDP?

28,7%

Masyarakat mengalami penyalahgunaan data pribadi

<30%

Perusahaan memiliki sertifikat manajemen informasi

Sistem perlindungan data

dinilai cukup baik tapi belum memadai (nilai 6 dari 10)

<23%

Perusahaan memiliki fungsi *Data Protection Officer* (DPO)

Sumber: Survei nasional oleh Ditjen Aptika pada 11.305 pengguna internet di 34 provinsi dan 135 pelaku usaha berbasis digital



Berkembangnya era teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat memungkinkan data pribadi menjadi aset atau komoditas bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital. Karenanya, data pribadi wajib dilindungi. Data pribadi merupakan hak yang harus dilindungi, sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

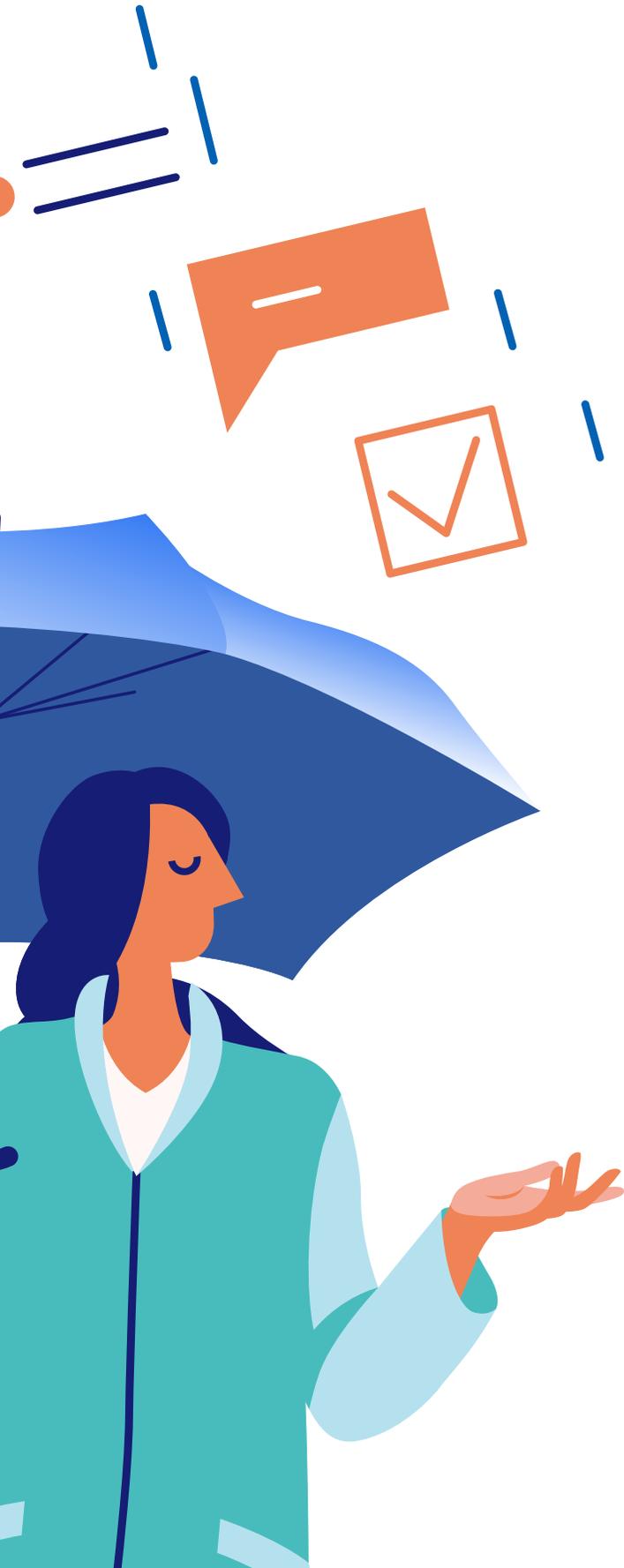
Mengenal UU PDP

UU PDP terdiri atas **16 bab** dan **76 pasal** yang mengatur mengenai beberapa substansi di antaranya:

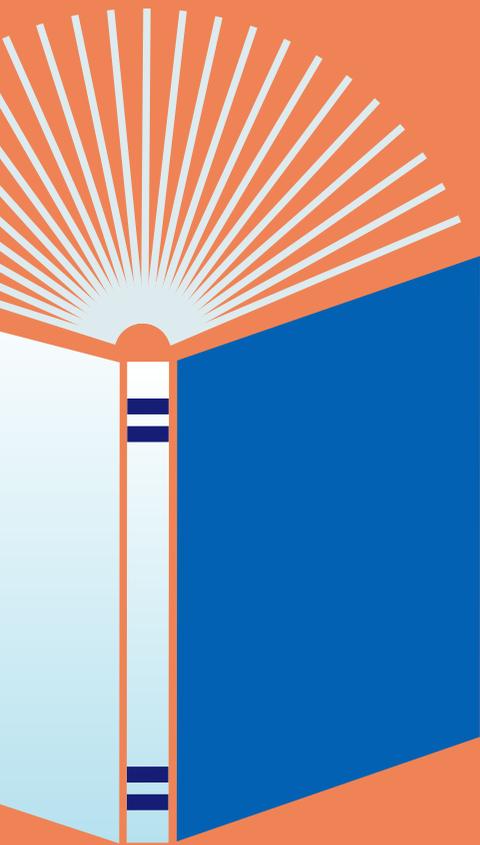
- 01 Definisi dan jenis data pribadi
- 02 Hak subjek data pribadi
- 03 Pemrosesan data pribadi
- 04 Kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi
- 05 Transfer data pribadi
- 06 Sanksi administratif
- 07 Kelembagaan
- 08 Kerja sama internasional
- 09 Penyelesaian sengketa dan hukum acara
- 10 Larangan dalam penggunaan data pribadi
- 11 Ketentuan pidana

16 Bab

76 Pasal



Linimasa Perjalanan UU Pelindungan Data Pribadi



Inisiasi Awal

Inisiasi awal pembahasan
72 pasal Rancangan
Undang-Undang tentang
Pelindungan Data Pribadi

2016



Harmonisasi dan Finalisasi

Proses harmonisasi
dan finalisasi antar
kementerian/lembaga

Terdapat penambahan
4 pasal tambahan
RUU PDP

2019



RUU PDP dikirimkan pada DPR

Januari – Februari:
Pendahuluan
Penugasan Presiden kepada Menkominfo, Mendagri, dan Menkumham melakukan pembahasan dengan DPR RI

Februari – Mei:
Pembicaraan Tingkat I
Rapat Panja berdasarkan RUU PDP oleh Komisi I DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah

2020



Pembahasan RUU PDP oleh Tim Panja Pemerintah

Juni:
**Konsinyasi Pembahasan
RUU PDP**

Penyusunan formulasi yang tepat dan akurat terhadap substansi pasal-pasal penting dalam RUU PDP

2021



RUU Menjadi UU

20 September:
Pembahasan Tingkat II
Pengesahan RUU menjadi UU, terdiri atas 16 bab dan 76 pasal

17 Oktober:
**Penandatanganan UU
PDP oleh Presiden**
RUU PDP resmi diundangkan menjadi UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

2022

Jenis-Jenis Data Pribadi yang Dilindungi

Data Pribadi yang bersifat umum

- Nama lengkap
- Jenis kelamin
- Kewarganegaraan
- Agama
- Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang



Manfaat UU PDP: Delapan Kemajuan Ruang Digital Indonesia

Data Pribadi yang bersifat spesifik

- Informasi kesehatan
- Data biometrik
- Data genetika
- Kehidupan/ orientasi seksual
- Pandangan politik
- Catatan kejahatan
- Data anak
- Data keuangan pribadi
- Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

01 Kenegaraan dan Pemerintahan

UU PDP menjadi bukti kehadiran negara dalam melindungi hak fundamental warga negara di ranah digital.

02 Hukum

UU PDP menjadi payung hukum Pelindungan Data Pribadi yang lebih komprehensif, memadai, dan berorientasi ke depan. UU PDP juga memberikan kesetaraan dan keseimbangan hak subjek data pribadi dengan kewajiban Pengendali Data Pribadi di mata hukum.

03 Tata Kelola Pemrosesan Data Pribadi

UU PDP mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi. Seluruh pengendali data pribadi di sektor pemerintahan maupun swasta, wajib melaksanakan seluruh kewajiban Pelindungan Data Pribadi, termasuk dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, khususnya anak dan penyandang disabilitas.

04 Ekonomi dan Bisnis

UU PDP diharapkan dapat meningkatkan standar industri dalam memenuhi tuntutan konsumen terhadap perlindungan data pribadi yang memadai. Hal tersebut dapat meningkatkan nilai serta daya saing dari pelaku ekonomi digital nasional di kancah global.

05 Pengembangan Teknologi

UU PDP mendorong industri untuk mengedepankan penggunaan perspektif Pelindungan Data Pribadi dalam setiap pengembangan teknologi baru. Hal tersebut dapat mendorong inovasi yang beretika, bertanggung jawab, dan menghormati hak asasi manusia.

06 Budaya

UU PDP akan memicu penyesuaian kesadaran dan kebiasaan masyarakat untuk lebih menyadari dan menjaga data pribadi, serta menghormati hak Pelindungan Data Pribadi orang lain.

07 Sumber Daya Manusia

UU PDP mendorong pengembangan ekosistem untuk memperbanyak talenta sumber daya manusia dalam bidang Pelindungan Data Pribadi, baik di pemerintahan maupun swasta.

08 Hubungan Internasional

UU PDP memperkuat kepercayaan dan rekognisi terhadap kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola data global. Hal ini sejalan dengan upaya-upaya Indonesia dalam G20 yang menginisiasi pengadopsian 3 (tiga) prinsip dalam *data free flow with trust* (DFFT) dan *cross border data flows* (CBDF) yaitu *lawfulness* (keabsahan/sah secara hukum), *fairness* (adil/sesuai tujuan pemrosesan), dan *transparency* (transparan).



03 Ekonomi Digital

Pengungkit Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional



Ekonomi digital, yang melibatkan transaksi dan interaksi berbasis teknologi digital, berperan sebagai pengungkit ekonomi nasional dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan efisiensi, dan memperluas akses pasar.

Dalam mendukung inklusi keuangan dan sosial, ekonomi digital berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup.

40%

Valuasi ekonomi digital kawasan Asia Tenggara berasal dari Indonesia

Sumber: Laporan e-Conomy SEA 2022, Google, Temasek and Bain & Company

Valuasi Ekonomi Digital Indonesia



3.1 UMKM Digital

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah sektor yang berperan besar pada perekonomian Indonesia dan terbukti tangguh menghadapi krisis.

64,2 Juta

Total UMKM

>60%

Kontribusi PDB Nasional

UMKM Indonesia memberikan sebesar lebih dari 60% terhadap PDB nasional

Sumber: Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) per Maret 2021

80%

Daya tahan lebih baik

Menurut data Bank Dunia, sekitar 80% UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik

Sumber: https://www.kominfo.go.id/content/detail/39377/pemerintah-terus-genjot-digitalisasi-umkm-untuk-percepat-pemulihan-ekonomi-nasional/O/virus_corona





Untuk mendukung pertumbuhan UMKM Indonesia, Kementerian Kominfo menjalankan program adopsi teknologi digital.

+30.000

UMKM

Telah menerima pelatihan adopsi teknologi dan pengembangan usaha

7.401

UMKM

Di antaranya berhasil tetap melakukan penjualan aktif pada platform digital dengan terus didampingi

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Kominfo 2022

3.2 Startup Digital

\$41M
2019



\$77M
2022
Nilai Industri
Digital

#4

Peringkat
Pengguna Internet

Sumber: Laporan e-Conomy SEA 2022, Google, Temasek and Bain & Company

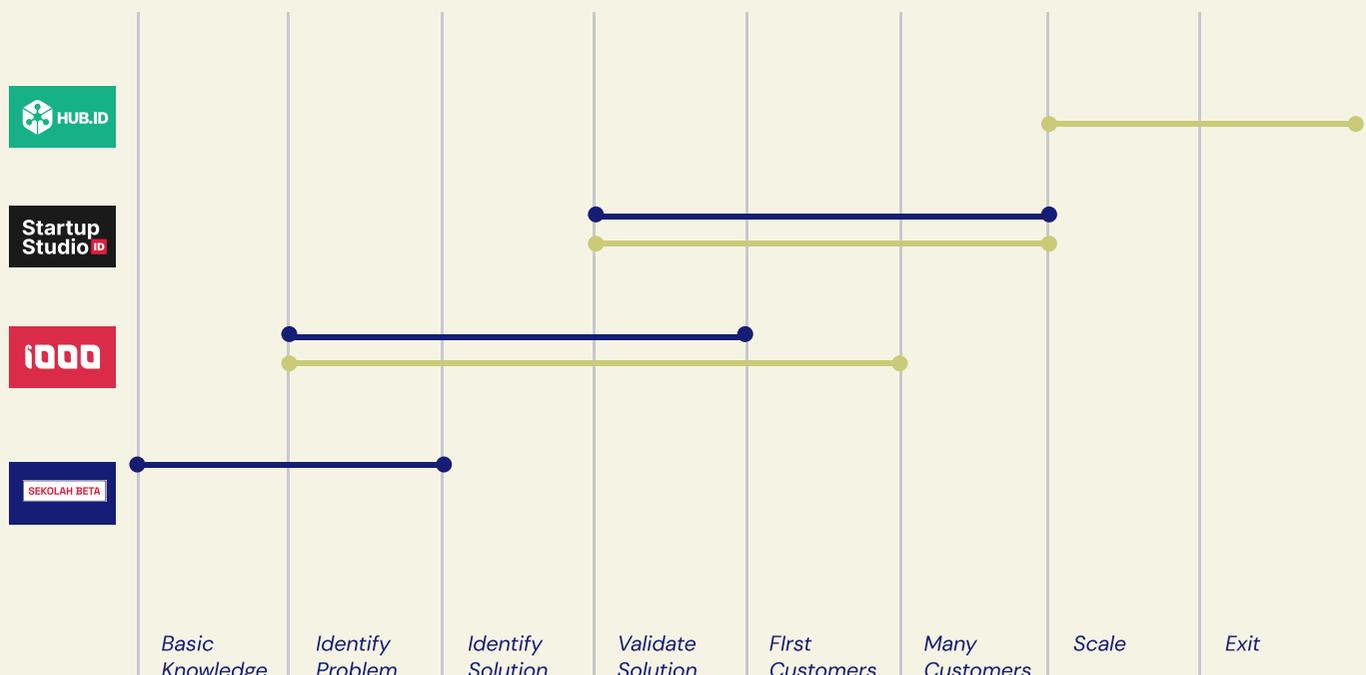
Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan nilai industri digitalnya berkembang signifikan dari US\$41 miliar pada 2019 menjadi US\$77 miliar pada 2022.

Indonesia juga negara dengan pengguna internet terbesar ke-4 di dunia. Dengan potensi yang besar, pemerintah mendorong masyarakat turut aktif berpartisipasi dan berkarya dalam inovasi digital.

Untuk itu, Kementerian Kominfo menjalankan rangkaian program pembinaan startup.

● Dukungan
Langsung

● Akses
Jejaring



SEKOLAH BETA

Sekolah Beta

Memberikan pembekalan bagi calon talenta digital dengan berbagai ilmu praktikal mengenai pengembangan diri, baik *hard skill* dan *soft skill*, berdasarkan peran di industri startup di Indonesia.

Capaian

SEKOLAH BETA
KELAS DARING

22.693

Peserta

47,5% mahasiswa
22,9% karyawan
16,5% wirausaha

111

Kelas

6,9% *freelancer*
4,8% tenaga pendidik
1,4% ASN

Target 2023

SEKOLAH BETA
INTENSIF

20

Peserta per kegiatan

6

Kegiatan setahun



komin.fo/sekolahbeta



Anggia Rahendra

Founder, Jagatani

“Saya punya ide startup yang berfokus membantu petani. Namun, saya sulit menemukan programmer yang mau bergabung, sehingga saya coba merintis dulu sendiri. Akhirnya saya nemu program Sekolah Beta Kelas Intensif untuk Hacker dan itu sangat membantu saya dalam membangun produk startup saya.”



Gerakan Nasional 1000 Startup Digital

Mengembangkan ekosistem digital nasional dan program pembinaan bagi calon founder untuk membentuk tim dan membuat *minimum viable product* (MVP).

Capaian

16.995

Calon startup founder

Terdaftar pada Gerakan Nasional 1000 Startup Digital 2022

180

Startup

Mengikuti Demo Day Gerakan Nasional 1000 Startup Digital 2022

Target 2023

35

Startup Digital

Memiliki *minimum viable product* dan berkolaborasi dengan ekosistem pentahelix daerah



komin.fo/startup-1000



Heinrich Vincent

Founder & CEO, Bizhare

"Di kegiatan networking #1000StartupDigital, saya menemukan orang-orang yang kini menjadi co-founder saya."



Asri Wijayanti

Founder, Jahitin

"#1000StartupDigital membantu saya untuk membentuk pengetahuan saya terkait startup dan juga membantu saya untuk dapat terkoneksi dengan tim dan juga partner-partner yang potensial untuk melakukan kolaborasi."



Ditto Anindita

CEO & Co-founder, Botika

"Di #1000StartupDigital kita diajarkan untuk membuat startup dari awal dan mengetahui bagaimana caranya agar bisa bertumbuh dengan cepat."

Startup Studio ID

Startup Studio Indonesia

Mendampingi startup digital *early-stage* agar lebih berkembang melalui penguatan produk, model bisnis, dan pengembangan retensi pengguna agar bisa menemukan *product-market fit*.

Capaian

26

Startup Digital Aktif

Memiliki perkembangan dalam 4 *key metrics*:

- Jumlah pendapatan
- Jumlah karyawan yang dipekerjakan
- Jumlah pengguna
- Pendanaan

Target 2023

35

Startup Digital

Mencapai *product-market fit*

720

Sesi Coaching

Dari berbagai mentor ahli



Chendy Jaya

Co-founder & CEO, Imajin

"Kami diperkenalkan dengan para *coach* yang telah melewati segala macam tantangan yang ada di dunia startup. Itu membantu kami untuk menentukan proses mana atau arah mana yang dapat kami tuju. SSI juga menghubungkan kami dengan investor-investor, bahkan ada beberapa *coach* yang menjadi *angel investor* di Imajin."



Mark Gabriel Priyono

Co-founder & CEO, Prieds

"Startup Studio Indonesia membantu kami untuk fokus dalam menemukan *product-market fit*, mulai dari mempelajari marketnya seperti apa dan apakah produk kami sesuai dengan marketnya."



komin.fo/startup-ssi



Hub.id

Program *matchmaking* bagi startup dengan berbagai *stakeholder* untuk memudahkan startup dalam menjalankan usaha, melakukan ekspansi pasar, dan mengakses *stakeholder* strategis.



Naufal Muhammad Herwandi

Squad Leader, PaDi UMKM

“Dengan ada *business matchmaking* ini kita bisa menjodohkan potensi startup dengan perusahaan yang sudah berjalan. Bersama kita melihat apakah ada potensi kolaborasi untuk *growth* bareng agar bisa bersama merasakan manfaatnya.”



Rizcky Alfath

VP Consumer Growth, LinkAja

“Senang sekali Kominfo telah mengadakan HUB.id. Bisa mencari kolaborasi dengan partner-partner di bidang finansial. Dengan banyak *use case* yang dimiliki LinkAja, kita bisa coba melihat mana yang bisa saling melengkapi, baik dari LinkAja ke startup, begitu juga sebaliknya.”



G20 Digital Innovation Network

Capaian

400

Partisipan

- 42 *venture capital*
- 55 startup
- Korporasi
- Pembuat kebijakan bidang digital

Presidensi G20 Indonesia menggelar G20 Digital Innovation Network (DIN) sebagai *side event* rangkaian pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG).

Lewat G20 DIN, delegasi anggota G20 dan negara undangan akan mengambil bagian dalam memecahkan masalah inovasi dan teknologi paling mendesak di dunia setelah pandemi.

G20 Digital Innovation Network menghadirkan berbagai sesi termasuk *startup pitch, keynote speech, diskusi panel, acara budaya, pertemuan bisnis 1-on-1, dan sesi networking kelas dunia.*



komin.fo/g20din

04 Masyarakat Digital

*Tingkatkan Keterampilan Digital,
Tingkatkan Daya Saing Bangsa*



Pentingnya masyarakat digital dalam meningkatkan daya saing bangsa terletak pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ekonomi global.

Dengan menguasai keterampilan digital, individu dan organisasi dapat berkolaborasi, menciptakan inovasi, serta meningkatkan efisiensi.

Masyarakat digital yang proaktif dan kompeten dapat memacu pertumbuhan ekonomi, membuka peluang kerja, dan mengukuhkan kedudukan bangsa di kancah dunia.



#51

(Digital Competitiveness Ranking 2022)

Indonesia menduduki urutan 51 dari 63 negara

Daya Saing Digital

#13

+36 dari 2021

Indeks Internet Inklusif 2022

Indonesia peringkat 13 dari 100 negara pada kategori *Readiness*

Kesiapan Masyarakat untuk Menghadapi Transformasi Digital

Sumber:

- IMD World Digital Competitiveness (WDC) ranking 2022
- The Inclusive Internet Index 2022 oleh Economist Impact

4.1 Pemerataan Literasi Digital

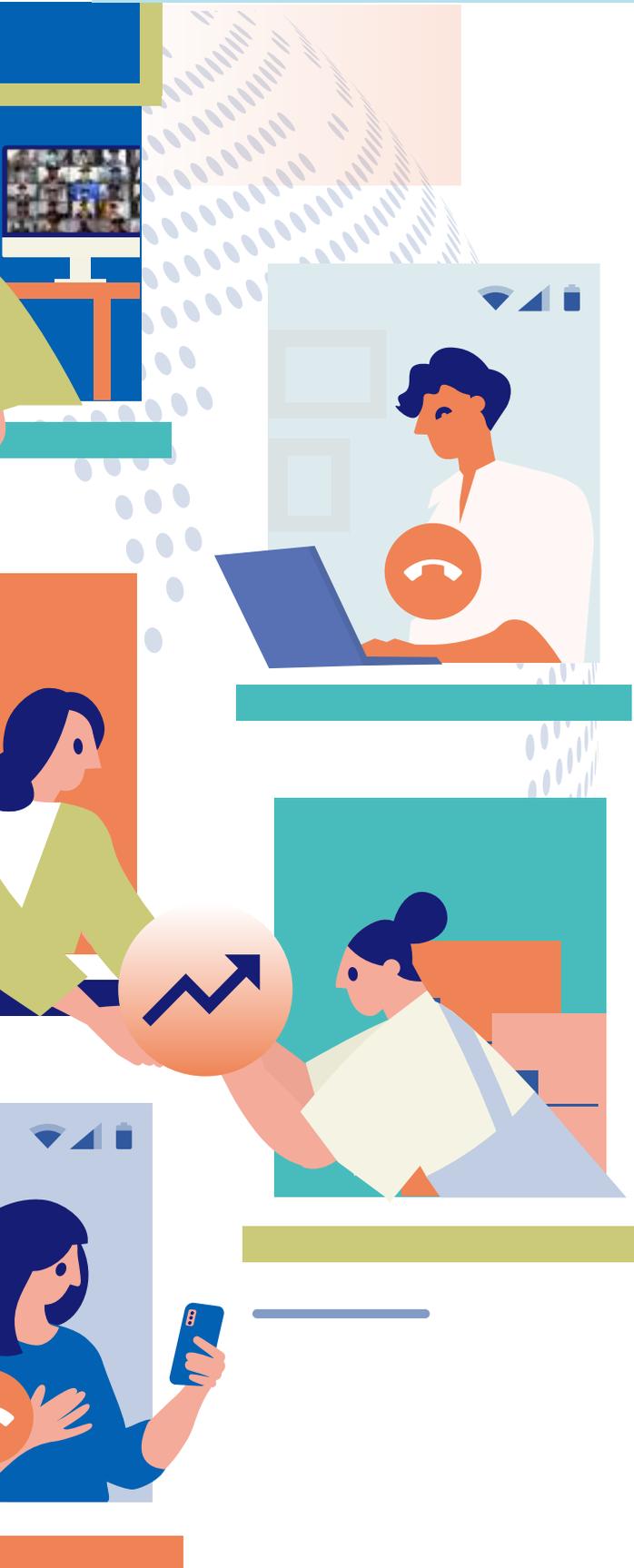
Dalam membangun masyarakat digital, Kementerian Kominfo menyiapkan berbagai pelatihan untuk meningkatkan tingkat literasi digital masyarakat.

Apa Itu Literasi Digital?

Literasi digital adalah kemampuan individu mengakses, memahami, mengomunikasikan, membuat, dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital yang bisa diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial.



Mengapa Literasi Digital Penting bagi Bangsa?



Pertumbuhan Ekonomi

Teknologi digital dan internet telah merevolusi cara bisnis beroperasi, dan negara-negara dengan tenaga kerja digital yang sangat terampil lebih cenderung menarik investasi dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Literasi digital memberi individu keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, yang semakin menjadi tulang punggung banyak ekonomi modern.



Pendidikan

Literasi digital sangat penting untuk pendidikan di abad ke-21. Dengan banyaknya sekolah dan universitas yang mengadopsi teknologi digital dan platform pembelajaran daring, siswa harus mahir dalam menggunakan alat ini untuk berhasil secara akademis.



Partisipasi dalam Demokrasi

Teknologi digital memiliki kekuatan untuk memberdayakan warga negara dan mendemokratisasi informasi. Literasi digital memungkinkan warga untuk mengakses informasi, terlibat dalam debat, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah mereka.



Inklusi Sosial

Teknologi digital memiliki potensi untuk menghubungkan orang, mempromosikan inklusi sosial, dan memerangi ketidaksetaraan. Literasi digital sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam dunia digital, terlepas dari status sosial ekonomi, usia, atau lokasi mereka.

Kerangka Kurikulum Literasi Digital



Digital Skills

Kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan Program Literasi Digital

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan berbagai mitra dari Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kominfo, Komunitas, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta, Akademisi, Masyarakat Sipil hingga Media. Berikut adalah tiga komponen dari pelaksanaan program:





Digital Culture

Kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK.



Digital Ethics

Kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (*netiquette*) dalam kehidupan sehari-hari.



Digital Safety

Kemampuan *user* (pengguna) dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.



Platform

Web dan aplikasi digital yang terintegrasi sebagai "sekolah" untuk mendalami literasi digital.



Framework

Acuan pengembangan konten literasi digital bagi partner program.



Activation

Rangkaian kegiatan secara *offline* dan *online* untuk memicu penggunaan teknologi digital.

Capaian



3,54 +0,05 dari 2021

Indeks Literasi Digital Indonesia 2022 berada pada level "sedang"

18.423.533

Peserta mendapatkan pelatihan literasi digital

Target 2023

5,5 Juta

Masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital

4.2 Peningkatan Kompetensi Digital

Indonesia adalah negara peringkat ke-4 dengan populasi terbesar di dunia dan diprediksi akan mengalami bonus demografi di tahun 2030–2040.

Untuk memaksimalkan potensi dari sumber daya manusia, Kementerian Kominfo menyiapkan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi digital masyarakat.



Capaian

245.224

Peserta telah mengikuti program pelatihan peningkatan kompetensi SDM bidang digital (DTS, Pelatihan ASN, dan DLA)

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Kominfo 2022

Target 2023

70%

Peserta pelatihan digital skill yang kompeten

(35.000 Peserta dari total 50.000 Peserta yang mengikuti pelatihan)

64%

Penduduk Berusia Produktif

Penduduk usia produktif yang berusia 15–64 tahun akan mendominasi populasi dengan total 64%.

23 Juta → **27–46 Juta**

Pekerjaan Diotomatisasi

Pekerjaan yang tergantikan oleh adanya otomatisasi.

Pekerjaan Baru yang Tercipta

Namun di saat bersamaan, terdapat pula pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul.

Sumber: Laporan Otomasi dan Masa Depan Pekerjaan di Indonesia, McKinsey (2019)

600.000 Orang/Tahun

Jumlah Kekurangan Talenta Digital

Indonesia mengalami kekurangan tenaga kerja semi-terampil dan terampil sebesar 9 juta orang pada tahun 2015–2030. Artinya, ada pekerjaan rumah untuk menghasilkan setidaknya 600.000 orang tenaga kerja tersebut per tahun.

Sumber: Laporan Preparing ICT Skills for Digital Economy: Indonesia within the ASEAN context, World Bank (2016)

Dampak

70%

Responden menyatakan keterampilan yang didapatkan dalam pelatihan digunakan pada pekerjaan sekarang

68%

Responden yang merupakan peserta pelatihan setuju pelatihan DTS dapat meningkatkan performa kinerja

Sumber: Hasil studi Evaluasi Dampak Program Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Tahun 2022

Program

Digital Talent Scholarship (DTS)

Program bagi angkatan kerja muda yang ingin melakukan *reskilling* dan *upskilling* di bidang digital, seperti *Cybersecurity*, *Artificial Intelligence*, *Big Data Analytics*, *Cloud Computing*, *Internet of Things*, *Mobile Programming*, *Digital Entrepreneurship*, dan *Digital Policy*.

Fresh Graduate Academy (FGA)

Lulusan D3, D4, S1 bidang TIK, MIPA dan Teknik yang belum atau tidak sedang bekerja

28.496 peserta *onboarding*

Government Transformation Academy (GTA)

ASN di berbagai kementerian/lembaga

25.645 peserta *onboarding*

Thematic Academy (TA)

Peserta umum yang ditujukan spesifik pada sektor industri/kalangan tertentu

47.579 peserta *onboarding*

Digital Entrepreneurship Academy (DEA)

Peserta umum

74.904 peserta *onboarding*

Professional Academy (ProA)

Peserta umum

38.637 peserta *onboarding*

Talent Scouting Academy (TSA)

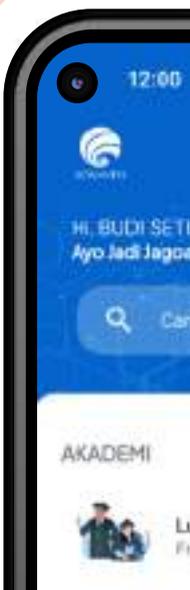
Mahasiswa aktif yang sejalan dengan Program "Merdeka Belajar Kampus Merdeka"

10.244 peserta *onboarding*

Vocational School Graduate Academy (VSGA)

Lulusan SMK dan D3/D4 bidang TIK, Telekomunikasi, Multimedia, DKV, Elektro, serta yang terkait dan belum atau tidak sedang bekerja

16.794 peserta *onboarding*



“Terima kasih DTS sudah memberikan wadah bagi para fresh graduate yang mungkin masih bingung setelah lulus bingung mau ke mana.”

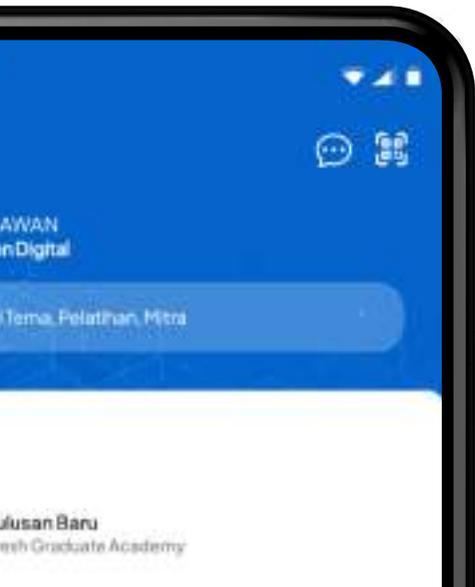
“Banyak ilmu berharga yang saya dapatkan dan menjadi fondasi yang berharga pada saat ini saya bekerja.”

“Pelatihan ini mengisi gap yang antara bangku perkuliahan dan apa yang perusahaan butuhkan.”

Testimoni



komin.fo/katadigiars



Pelatihan ASN

Pendidikan dan pelatihan baik bidang teknis, manajerial, dan fungsional bagi aparatur sipil negara.

Diklat Teknis

878 peserta *onboarding*

Diklat Manajerial

1.155 peserta *onboarding*

Diklat Fungsional

329 peserta *onboarding*

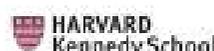
Digital Leadership Academy (DLA)

Program untuk meningkatkan kapasitas pemimpin dalam menginisiasi dan mendorong perubahan menuju transformasi digital.

Salah satu output dari pelatihan ini adalah merumuskan kebijakan kolaboratif yang mendorong sinergitas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri digital sehingga meningkatkan daya saing ekonomi digital Indonesia.

Bekerja sama dengan:

University of Oxford, Harvard Kennedy School, Cornell University, National University of Singapore, Massachusetts Institute of Technology, University of Cambridge, Tsinghua University, dan Imperial College.



563

Peserta *onboarding*



Dukungan Kementerian Kominfo dalam Orkestrasi Komunikasi Publik

Pelaksanaan diseminasi informasi komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo bertujuan agar masyarakat memperoleh pemahaman dan pemerintah mendapatkan kepercayaan publik. Dengan adanya komunikasi publik yang akurat, tepat dan pemilihan gaya komunikasi serta narasi sesuai segmentasi kelompok masyarakat, maka akan meningkatkan kredibilitas pemerintah.

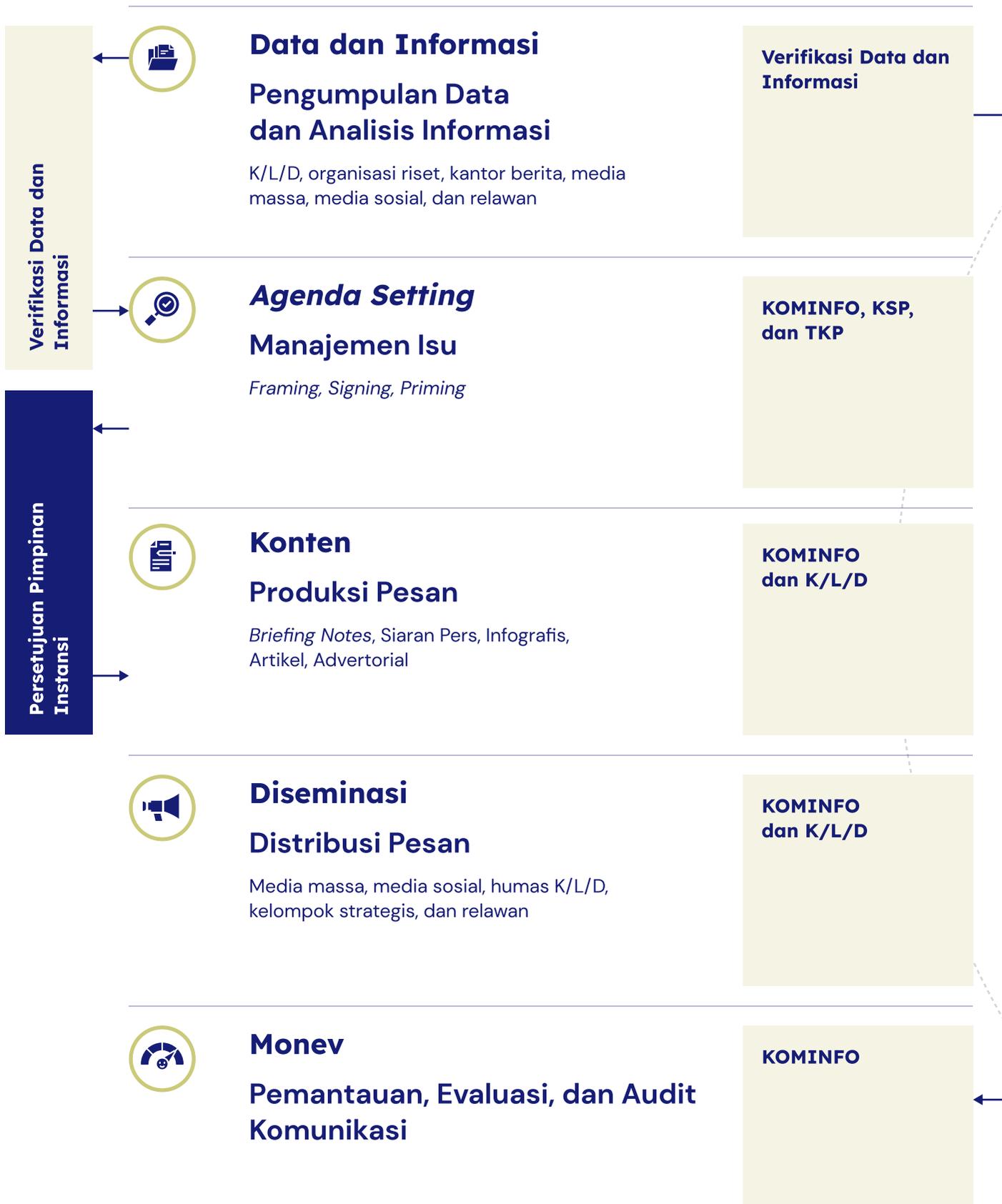


Untuk menunjang kecepatan penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, Kementerian Kominfo memiliki tugas sebagai *Government Public Relations (GPR)* untuk membuat narasi tunggal yang kemudian disebarluaskan ke publik oleh instansi-instansi pemerintah melalui beragam saluran komunikasi yang mereka miliki.

Tugas Kominfo sebagai *Government Public Relations (GPR)* tertuang dalam:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menuntut pemerintah melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat (*obligation to tell*), dan untuk memenuhi hak untuk tahu (*right to know*).
- Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik yang menugaskan Kementerian Kominfo melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan pemerintah.

Alur Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik



Produk Informasi dan Jejaring Komunikasi Publik



Jejaring Komunikasi Publik

Produk Informasi

Bakohumas 821 K/L/D/ BUMN/D

Isu Prioritas

Secara garis besar, isu prioritas komunikasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo melalui produk informasi dan jejaring komunikasi publik yang tersedia, antara lain:



Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022



Percepatan Penurunan Angka Stunting



Gerakan Bangga Buatan Indonesia



Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat



Pendidikan Karakter Pancasila



Literasi Keuangan Digital

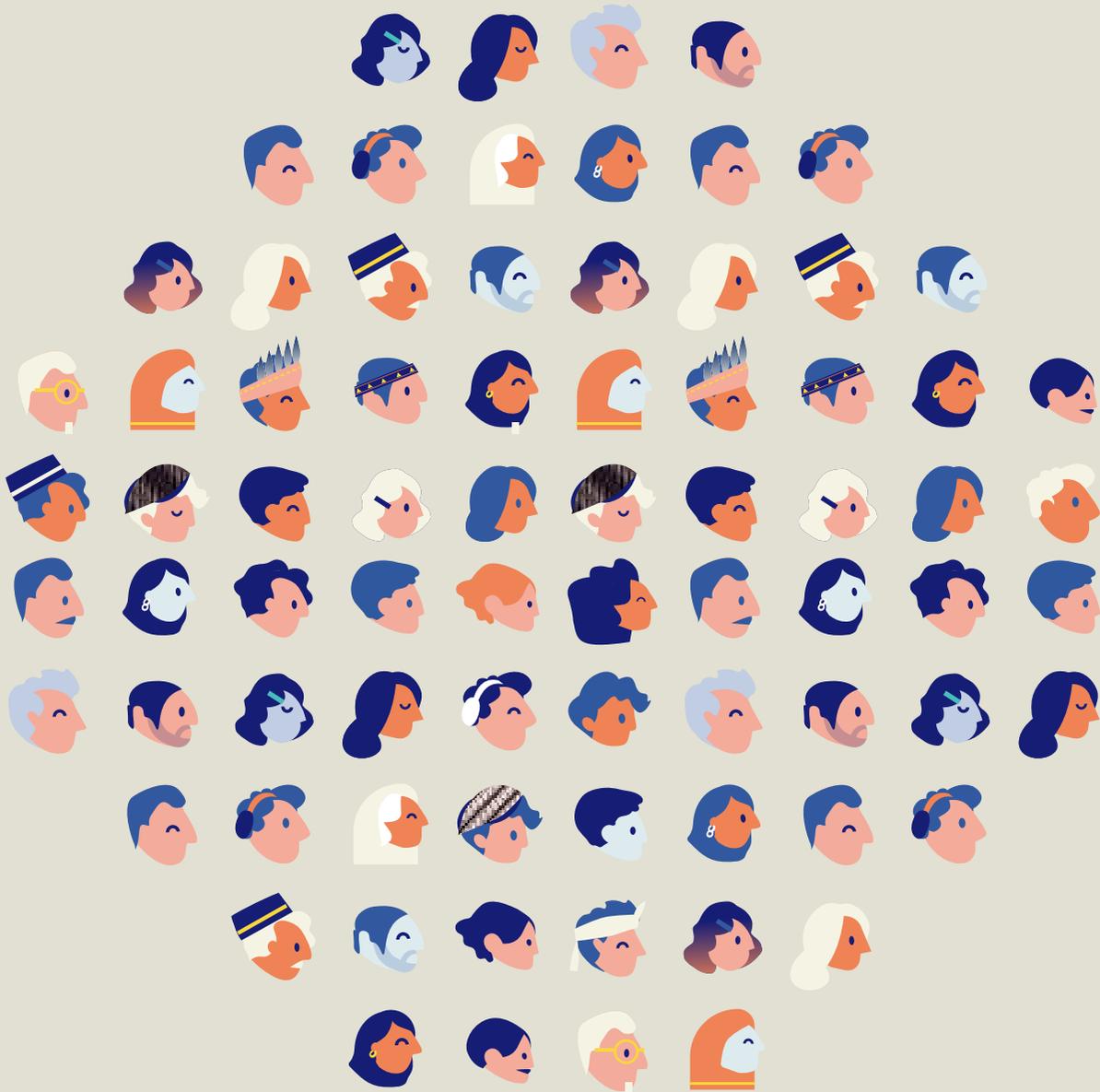


Sosialisasi RUU KUHP

Capaian

79,45%

Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah



78,4%

Nilai kualitas akses

80,5%

Nilai kualitas konten

Peran Kementerian Kominfo dalam Forum Internasional

*Ragam Kemitraan Strategis
Global untuk Akselerasi
Transformasi Digital*



Sebagai negara yang berpartisipasi aktif dalam isu-isu global, Kementerian Kominfo mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam berbagai forum internasional.



Keterlibatan Kominfo dalam forum internasional lainnya:

- Asia Pacific Economy Cooperation (APEC), Asian Pacific Postal Union (APPU), Asia Pacific Telecommunication (APT), ASEAN



G20 Digital Economy Working Group (DEWG) dan Digital Economy Ministers' Meeting (DEMM)

Dari Pertemuan DEWG dan DEMM tersebut dihasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Chair's Summary, di mana anggota G20 menyepakati untuk meningkatkan peran dan kontribusi ekonomi digital untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan.



International Telecommunication Union Plenipotentiary (ITUPP) Council

Indonesia untuk kesembilan kalinya terpilih kembali menjadi perwakilan anggota Dewan (Council) periode 2023 -2026 dari Kawasan E - Asia dan Australasia. Indonesia berhasil menduduki peringkat ketiga dari 13 negara yang telah terpilih, dengan memperoleh 157 suara.

Penghargaan

Kominfo terus berupaya mengoptimalkan kinerja guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berkualitas.

Selama tahun 2022, terdapat berbagai penghargaan yang diterima Kementerian Kominfo. Beberapa penghargaan yang diterima, di antaranya sebagai berikut:



Penghargaan Top Digital Awards 2022 (Majalah It Works)

- TOP Leader on Digital Implementation 2022
- TOP Digital Implementation 2022 Bintang 5
- TOP CIO on Digital Implementation 2022



TOP GPR Award 2022

GPR Institute dan SUARAPEMERINTAH.ID



Opini WTP

Penghargaan atas Laporan Keuangan TA. 2021 dari BPK RI dan telah diterima Kementerian Kominfo selama 6 tahun berturut-turut



Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)

Kepatuhan Tinggi Tingkat K/L Tahun 2021



Penghargaan Anugerah Meritokrasi 2022 (Kementerian PAN&RB)

- Sangat Baik



BKN Award

- Peringkat 1: Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT
- Peringkat 5: Implementasi Penerapan Manajemen Kerja



Public Relation Indonesia 2022 Awards (PRIA)

- *Silver Winner* – Kategori Program PR: Digital PR "Terujung Terkoneksi"
- *Bronze Winner* – Kategori Brand Guideline Manual Book Logo BAKTI
- *Bronze Winner* – Kategori Aplikasi: Aset Manajemen Sistem
- *Bronze Winner* – Kategori Departemen PR: untuk BAKTI secara kelembagaan



Penghargaan Indonesia DEI (Diversity, Equality, Inclusivity) dan ESG (Environmental, Social & Governance) / IDEAS

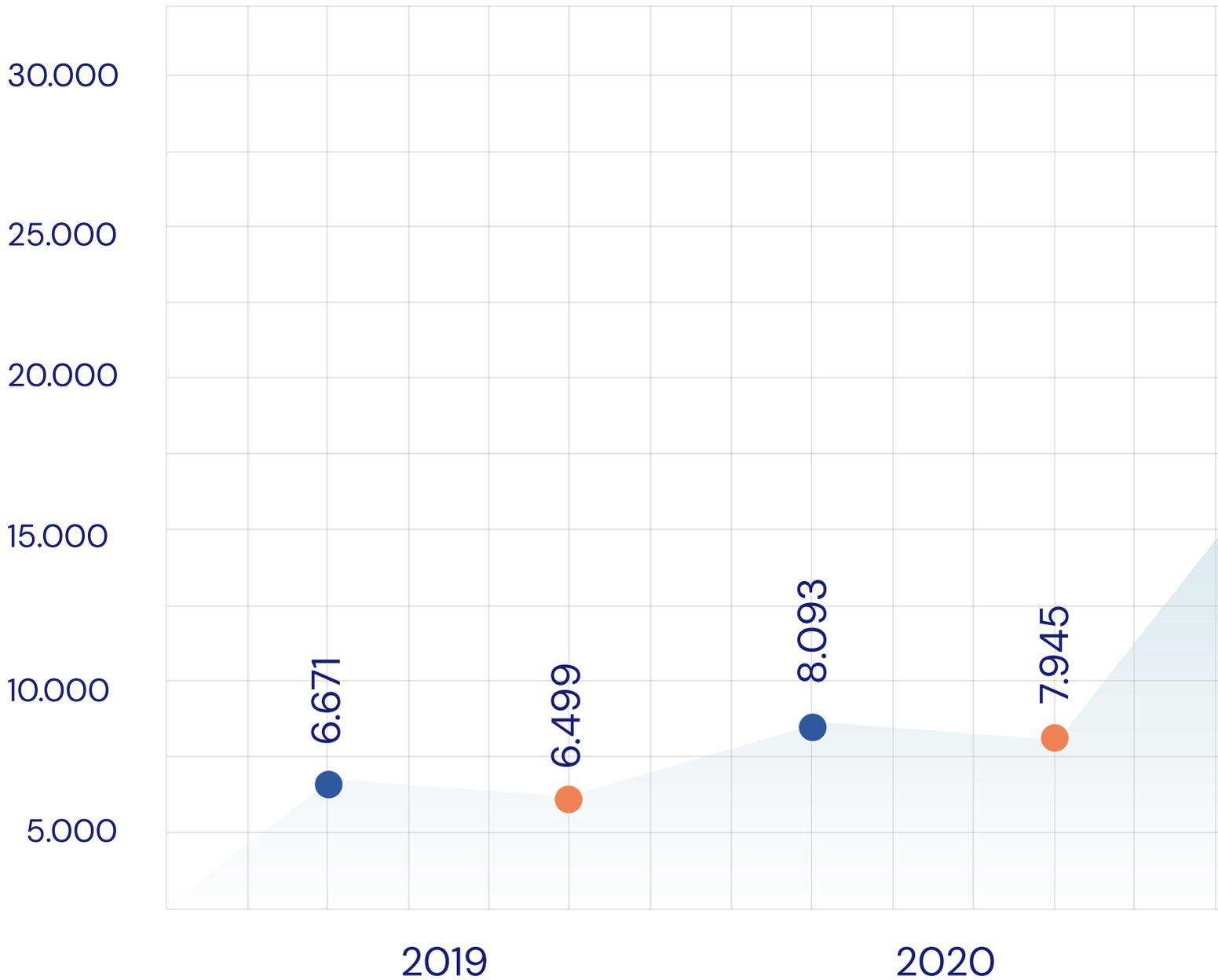
- *Gold Winner* – Kategori ESG Sustainable Tourism – Mengembangkan Ekosistem Pariwisata Indonesia di Daerah 3T melalui Kolaborasi, Teknologi Digital, dan Akses Pasar Global
- *Bronze Winner* – Kategori DEI Keberpihakan terhadap Disabilitas – Aksesibilitas untuk Disabilitas



Kinerja yang Baik di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2021 (Kementerian Keuangan)

- Juara III Utilisasi Barang Milik Negara (BMN) untuk Kelompok Kementerian/ Lembaga dengan Satuan Kerja 11 sampai dengan 100 Satuan Kerja

Kinerja Anggaran



Realisasi anggaran
Kementerian Komunikasi dan Informatika
pada TA 2022 adalah sebesar

Rp21.381.061.310.289

● Pagu Anggaran ● Realisasi Anggaran



81,06%
dari Total Pagu

Total Pagu

Rp26.376.362.918.000

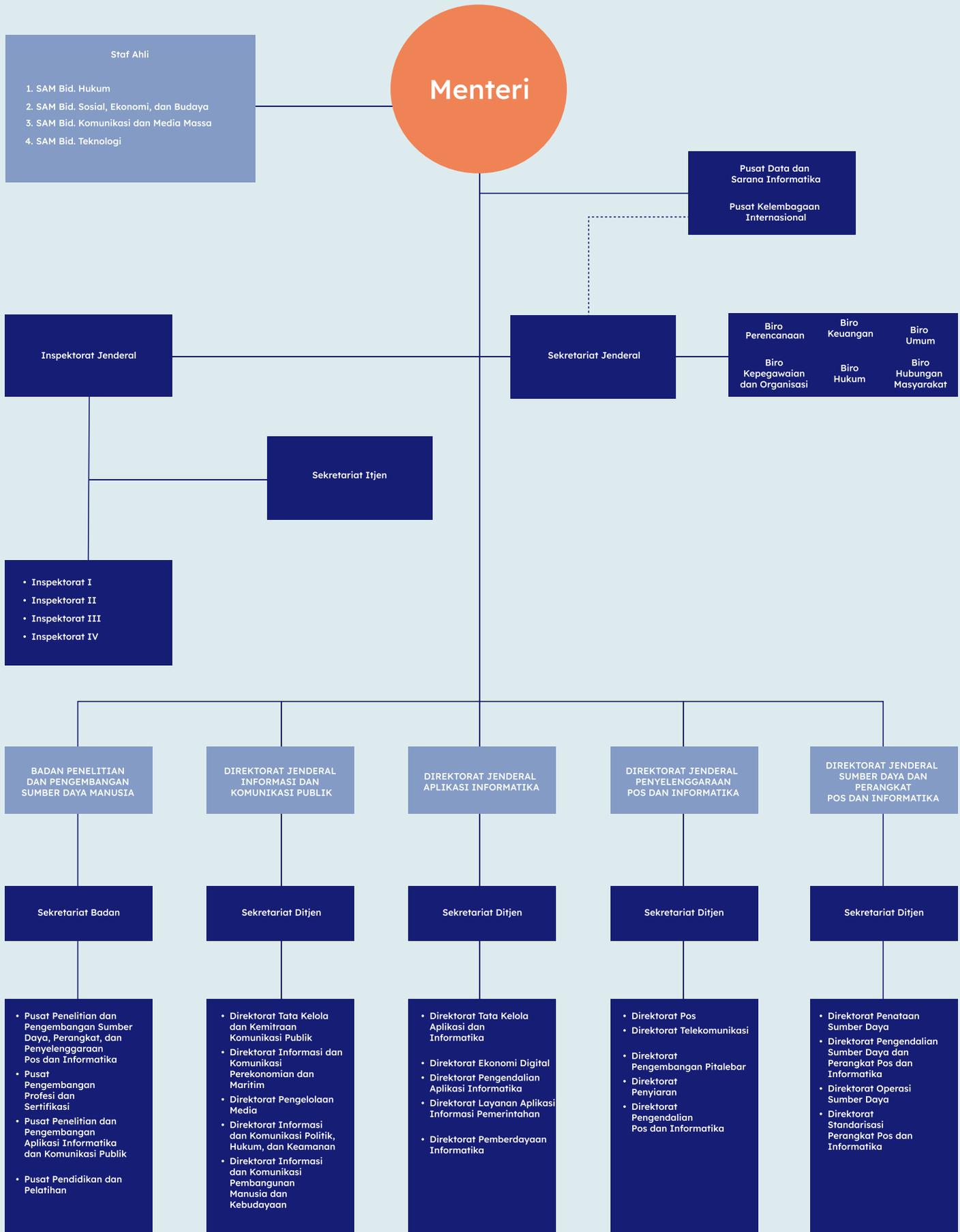
Profil Kementerian Kominfo

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Kominfo menjalankan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
5. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
8. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Struktur Organisasi

Sumber: PM Kominfo No. 12 Tahun 2021



Organisasi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kominfo di daerah:

Unit Kerja Eselon I	Unit Organisasi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis
DITJEN SDPPI	1 Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, 13 Balai Monitor (BALMON) Spektrum Frekuensi Radio Kelas I, 14 Balai Monitor (BALMON) Spektrum Frekuensi Radio Kelas II, dan 8 Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio.
BALITBANG SDM	2 Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP Kominfo), 6 Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo), 1 Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK), dan 1 Sekolah Tinggi Multi Media (STMM).
DITJEN IKP	1 Museum Penerangan dan 1 Monumen Pers Nasional

Organisasi di bawah koordinasi Kementerian Kominfo di luar PM Kominfo Nomor 12 Tahun 2021:

1. **Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).** Badan Layanan Umum (BLU) yang bertugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Informatika.
2. **Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia.** Sekretariat yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam menyelenggarakan fungsi dan wewenangnya.
3. **Sekretariat Komisi Informasi Pusat.** Sekretariat yang bertugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
4. **Sekretariat Dewan Pers.** Sekretariat yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Pers dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Sumber Daya Manusia

Total Pegawai

5.445

Pegawai

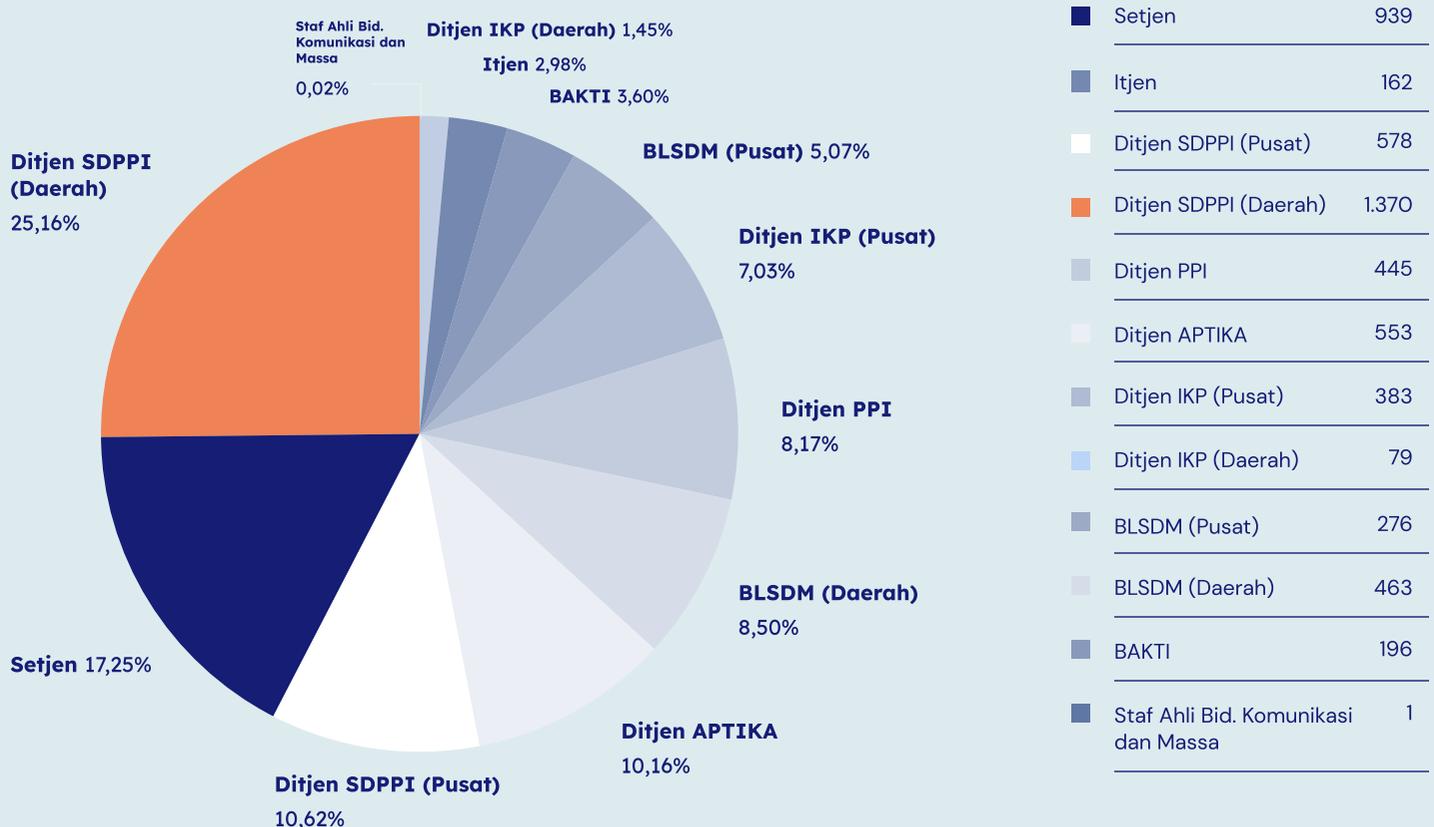
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Kominfo didukung oleh 5.445 pegawai dari berbagai unit kerja dan unit organisasi dengan komposisi sebagai berikut:

Pria	♂	Wanita	♀
62,11%		37,88%	
Total	3.382	Total	2.063
Pusat	2.045	Pusat	1.485
Daerah	1.337	Daerah	578

▼ Komposisi Pegawai berdasarkan Unit Kerja (per 31 Desember 2022)

▲ Komposisi Pegawai Kementerian Kominfo Berdasarkan Jenis Kelamin (per 31 Desember 2022)

Unit Kerja



Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

